

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

903/1108/406.028/2023

Nomor: 903/1774/406.007/2023

Tanggal: 11 Agustus 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor :

9<u>03/ 1108 /406.028/20</u>23 903/ 1774 /406.007/2023

Tanggal: 11 Agustus 2023

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan

: BUPATI TRENGGALEK

Alamat Kantor

: Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek

2. a. Nama

: SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

Alamat Kantor

: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

b. Nama

: DODING RAHMADI, S.T.;

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

Alamat Kantor c. Nama

: ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.;

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

Alamat Kantor d. Nama

: AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

Alamat Kantor

: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 11 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Ketua,

SAMSÜL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.

Wakil Ketua

DODING RAHMADI, S.T.

Wakil Ketua,

ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.

Wakil Ketua

AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.

DAFTAR ISI

Daftar	Si		
Bab 1	Pendahuluan	1	
	1.1. Latar Belakang	1	
	1.2. Tujuan	6	
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan	7	
Bab 2	Kerangka Ekonomi Makro Daerah		
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11	
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	25	
Bab 3	Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	30	
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	30	
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	32	
Bab 4	Kebijakan Pendapatan Daerah4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	147	
	yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	147	
Bab 5	Kebijakan Belanja Daerah	152	
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.	152	
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	155	
Bab 6	Kebijakan Pembiayaan Daerah	160	
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	162	
	6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	163	
Bab 7	Strategi Pencapaian	164	
Rah 8	Popultup	171	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2023. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional. Dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, tema pembangunan Tahun 2023 adalah: TRANSFORMASI EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI SDM INOVATIF, KOLABORATIF SERTA INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan dua prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Trenggalek Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk

dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan yang melandasi perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

- 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- 2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- 4. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

merupakan Kemiskinan permasalahan sangat yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan baru berupa system thinking untuk dapat melihat permasalahan secara komprehensif mengenai unsur-unsur penyebab kemiskinan dan kemudian dapat dipetakan keterkaitan antar faktor tersebut. Kemiskinan identik dengan kurangnya pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga untuk hidup layak yang menyebabkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan layak juga berkurang. Rendahnya pendidikan menyebabkan level keterbatasan dalam aspek pengetahuan, keterampilan serta penguasaan Teknologi dan Informasi. Selanjutnya dengan adanya keterbatasan tersebut menyebabkan tingkat daya saing yang dimiliki menjadi tidak kompetitif sehingga turut menurunkan kesempatan kerja. Selain itu, memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 yang meliputi:

- 1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
- 4. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer dan pendapatan BKK Dana;
- 5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
- 6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;

7. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2023 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Trenggalek Tahun 2023. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2023. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi:

- 1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
- 2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
- 3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek.

- 4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023 dan target perubahan pendapatan daerah tahun 2023.
- 5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
- 6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
- 7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
- 8. Penutup

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
- Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- 3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
- 4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan

- prioritas nasional, regional dan daerah;
- 5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Pemerintah 18 Peraturan Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun
 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
- 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);
- 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 18).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025, tahun 2022 merupakan bagian dari periodesasi tahap keempat (2020-2024). Pembangunan tahap keempat tersebut diarahkan untuk lebih "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif". Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian berbasis agrobisnis/agroindustri vang pelestarian kualitas dan fungsi Iingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai. Dalam penjabarannya sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, mengamanatkan bahwa pada tahun 2023 diarahkan pada

Peningkatan kualitas SDM koaboratif yang didukung dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dalam upaya mewujudkan infrastruktur tangguh dan kemandirian ekonomi.

Untuk itu guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 diupayakan harus sejalan, sinkron dengan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah merupakan hal penting dalam mencapai efektifitas pembangunan serta sinkronisasi rencana pembangunan dan pertimbangan/asumsi yang menjadi landasan penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah provinsi menjadi faktor penting untuk dijadikan pedoman.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian regional, perekonomian nasional dan perekonomian global serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya. Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah

pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Kinerja indikator ekonomi selama tiga tahun terakhir memberikan capaian yang fluktuatif, beberapa capaian tersebut adalah:

- Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 dan 2021 masih lebih baik dibandingkan Provinsi, pada tahun 2022 naik menjadi 4,52%.
- Peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 PDRB perkapita Trenggalek sebesar 28,23 juta rupiah.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek tahun 2020 -4,11% lebih baik dibandingkan capaian TPT Nasional -7,07% dan TPT Provinsi Jawa Timur (5,84%). Pada Tahun 2021 Tingkat pengangguran turun menjadi 3,53%, namun meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 5,37% dan masih berada dibawah TPT provinsi yang sebesar 5,49%.
- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek menunjukkan fluktuatif kondisi, terjadi peningkatan pada tahun 2020-2021 dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Trenggalek sebesar 12,14% dan memiliki kecenderungan diatas Provinsi dan Nasional. Namun di tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 10,96%.

- Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 dan 2022 lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan pendapatan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2022 Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek menurun menjadi 0,331.
- IPM Kabupaten Trenggalek berkategori "IPM Sedang". Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari yang semula 69,74 pada tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 70,06 di tahun 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 71.

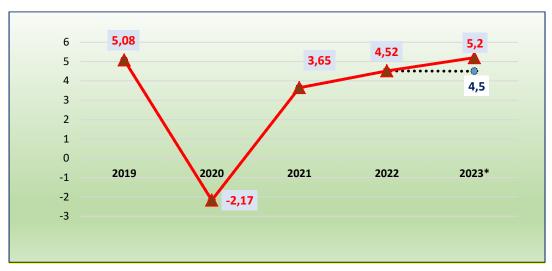
Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2019 sebesar 5,08%, dan turun menjadi -2,17% di tahun 2020. Pada tahun 2021 tumbuh positif menjadi 3,65% dan pada tahun 2022 pertumbuhannya meningkat menjadi 4,52%.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan posistif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menumbuhkan wirausaha baru dan memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

Grafik II. 1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 26,65 juta rupiah di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 26,63 juta rupiah di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 27,44 juta rupiah dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 28,23 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan kembali seiring membaiknya perekonomian.

29 28,37 28,23 28,5 28 27,44 27,5 27 26.65 26,63 26,5 26 25,5 2019 2020 2021 2022 2023*

Grafik II. 2 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2024 (*dalam jutaan rupiah*)

Sumber: BPS Kab. Trenggalek
*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Dengan peningkatan PDRB Perkapita mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dari tahun ke tahun.

Indeks Gini (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

0,379 0,39 0,3756 0,372 0,38 0,37 0.36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,331 0,31 0,3 Th.2019 Th.2020 Th.2021 Th.2022 Th.2023*

Grafik II. 3 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur
*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan Grafik III.3, dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode tersebut berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 0,372, di tahun 2020 menjadi 0,379, di tahun 2021 turun menjadi 0,335 dan Kembali menurun di tahun 2022 menjadi 0,331. Sedangkan pada tahun 2023 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam

pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 3 (tiga) tahun terakhir Tahun menunjukkan capaian yang fluktuatif. TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,43%, dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,11%. Sedangkan di tahun 2021 dengan membaiknya perekonomian meskipun belum mereda Trenggalek pandemi Covid-19, TPT Kabupaten mengalami penurunan menjadi 3,53%. Namun di tahun 2022, TPT Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan kembali menjadi 5,37%.

Grafik II. 4 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kab. Trenggalek
*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2022 yang mencapai 5,37% tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

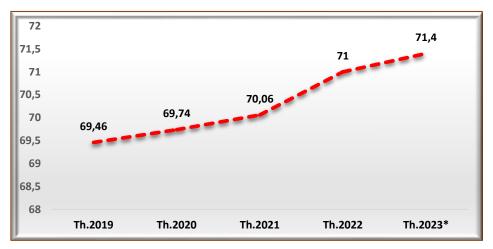
Dari data BPS diatas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2022 mencapai 17.012 jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sekitar 14.568 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penganggur meningkat sekitar 2.444 jiwa. Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2023 diproyeksikan berada pada kisaran 4,0 dan 3,8.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2019 sebesar 69,46, tahun 2020 naik menjadi sebesar 69,74, tahun 2021 meningkat menjadi 70,06 dan pada tahun 2022 berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 71. Sedangkan tahun 2023-2024 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 71,4 dan 71,93. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2019-2023 terlihat pada **Grafik** berikut:

Grafik II. 5 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan minimum batas pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan tergolong miskin atau tidak. seseorang Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun 2019-2021, dari 10,98% di tahun 2019, meningkat menjadi 11,62% di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 12,14% di tahun 2021. Hal ini diperkirakan dampak dari pandemi Covid-19 dalam 2 (dua) tahun terakhir belum menunjukkan kapan berakhirnya. Di tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan menjadi 10,96% atau sejumlah 76,75 ribu penduduk miskin (jiwa).

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan seiring meningkatnya intensitas vaksinasi Covid-19 dan semakin banyaknya penduduk yang mendapatkan vaksin, diharapkan nantinya akan meningkatkan taraf kesehatan dan perbaikan ekonomi, sehingga akhirnya akan menekan kembali angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dengan asumsi tersebut, maka angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 10,75%.

13

12,02

11,62

10,98

10,98

10,94

10

Th.2018

Th.2019

Th.2020

Th.2021

Th.2022*

Grafik II. 6 Realisasi dan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas

dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023, sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia kolaboratif yang didukung dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dalam upaya mewujudkan Infrastruktur tangguh dan Kemandirian Ekonomi, yang di terjemahkan dalam tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 yaitu "TRANSFORMASI EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI SDM INOVATIF, KOLABORATIF SERTA INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN" dengan dua program prioritas yaitu:

- Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan

Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023, beragam tantangan dimaksud harus disikapi secara komprehensif dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2. Pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19 dengan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan utamanya yang memiliki keunikan dan kekhasan daerah yaitu

- pertanian (utamanya yang berbasis organik, pariwisata (termasuk desa-desa wisata) dan industri (termasuk industri kreatif);
- 3. Pengentasan Kemiskinan dengan optimalisasi implementasi Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) secara konsisten;
- 4. Pengurangan Kesenjangan antar pendapatan masyarakat dengan mengimplementasikan program-program yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, dengan swasta (*public-private partnership*) serta mendorong pembiayaan pembangunan melalui CSR. Upaya ini penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
- 6. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar, gerai-gerai UMKM, anjungan cerdas, *rest area* dan toko modern berbasis koperasi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek;
- 7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan;
- 8. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan program-program bagi Usaha Mikro melalui penumbuhan fasilitasi akses permodalan, peningkatan daya saing produk, promosi, jaringan pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro;
- 9. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat;

10. Pembuatan paket-paket wisata yang terintegrasi dari hulu dan hilir, dengan mengedepankan kemudahan wisatawan dalam melakukan pemesanan sampai alokasi anggaran wisata.

Terkait dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19, beberapa wilayah telah melakukan langkah luar biasa (extraordinary), termasuk diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kebijakan yang sudah ditempuh untuk pemulihan dampak ekonomi di Trenggalek diantaranya adalah:

- Pemangkasan rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBD utamanya belanja pertemuan dan perjalanan dinas.
- 2. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia.
- 3. Penjaminan ketersediaan kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat Kabupaten Trenggalek.
- 4. Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan (Perbankan) untuk relaksasi pinjaman (penundaan angsuran) kepada UMKM yang terdampak.
- 5. Optimalisasi UMKM (*home industry*) yang tidak terdampak Covid-19 (spt. Pembuatan masker dari kain, pembuatan desinfektan, *hand sanitizer*, dll).
- 6. Mengoptimalkan dana CSR/Baznas untuk pelaku usaha yang terdampak virus corona (covid-19).

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, realisasi dan proyeksi perekonomian nasional maupun Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022-2023, maka prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2023 sebagaimana

Indikator Makro Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja makro diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 1 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	70,06	71	71,40
2	Angka Kemiskinan (%)	11,62	12,14	10,96	10,75
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11	3,53	5,37	3,8
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-2,17	3,65	4,52	4,5-5,2
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	26,23	27,44	28,23	28,37
6	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,379	0,335	0,331	0,3756

Sumber: RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan BPS Kab. Trenggalek

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

merupakan salah dalam Perencanaan satu tahap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas

dan dapat memberikan dampak nasional langsung bagi pendekatan tugas fungsi. Penyusunan masyarakat dengan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan dan penganggaran, 2) konsistensi dan antara perencanaan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

- a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas: pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas: belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
- Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah)

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri atas:

- Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- ➤ Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Hal tersebut untuk merespon dinamika global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global, sehingga inflasi meningkat dari semula 3,3% menjadi 3,6%. Terdapat pula penyesuaian pada asumsi Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp14.750,00/US\$ menjadi Rp14.800,00/US\$, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi ICP disepakati tetap berada pada level US\$90/Barel, dengan pertimbangan bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan. Untuk asumsi *lifting* gas dinaikkan menjadi 1.100 (ribu bsmph) dari semula 1.050 (ribu bsmph).

Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain

tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,3	5,3
Inflasi (%, yoy)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
Tingkat Suku Bungan SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	90	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari	1.050	1.100

Sumber: Kementerian Keuangan

Undang-undang harmonisasi perpajakan yang telah ditetapkan diharapkan akan menjadi basis perpajakan Indonesia yang baru. Selanjutnya, Undang-undang Cipta kerja juga diharapkan memberikan landscape ekonomi cara bekerja yang baru untuk perekonomian Indonesia. Saat ini sedang ada proses mendiskusikan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedepan UU itu diharapkan akan menjadi basis baru dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Beberapa poin-poin besar dari reformasi yang terus dipikirkan meskipun ada di dalam situasi pandemi. Tidak ingin menyia-nyiakan krisis, justru menggunakan momentum krisis untuk menaruh reformasi-

reformasi baru, termasuk juga terus merespons tantangan dan mitigasi atas tantangan perubahan iklim kedepannya.

Upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan Indonesia dengan meratifikasi *Paris Agreement* yang berisi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 29% melalui usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional. Indonesia membutuhkan pembiayaan yang besar pada upaya ini. Perubahan iklim ini harus dimitigasi, karena itu *net zero emission* bukan merupakan suatu pilihan, termasuk dalam hal penggunaan energi baru dan terbarukan.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan arah kebijakan pembangunan: Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industry Perdagangan Dan Jasa Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Keselarasan Arah Kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antar level maupun antara daerah.Selain itu prioritas Pembangunan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur, tujuh prioritas pembangunan tersebut diantaranya adalah:

- Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
- Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur

- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
- 4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
- Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber
 Daya Energi
- 6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Jawa Timur

Kebijakan kewilayahan merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada:

- 1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
- 2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan

- investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
- 3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan stakeholder dan peningkatan konektivitas ekonomi.

Arah pengembangan pembangunan tahun 2023 yang diamanatkan pada seluruh kabupaten/ kota lingkup Bakorwil I Madiun :

- 1. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor potensial
- 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja
- 3. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
- 4. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan untuk mendorong sektor unggulan
- 5. Optimalisasi pemutakhiran data penduduk miskin melalui verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial
- 6. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan
- 7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
- 8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 9. Peningkatan aksesibilitas (konektivitas antar daerah)
- 10. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan optimalisasi peran lembaga Pemerintah Desa.

Berdasarkan arah kebijakan Jawa Timur dan Bakorwil Madiun tersebut, Arahan Pembangunan Kabupaten Trenggalek adalah Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis sub sektor perikanan; Pengembangan Minapolitan; dan Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dalam mendukung pembangunan Kota Baru Prigi. secara spesifik strategi pengembangan wilayah klaster wilis selatan, khususnya Kabupaten Trenggalek adalah:

- 1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan :
 - ➤ Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat;
 - Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan
 - pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan
- 2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan;
 - Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal diantaranya adalah Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis, dan Realignment jalur Malang-Blitar.
 - Hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan STP (Science Techno Park) Atsiri;
 - Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; dan
 - Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional.
- 3. Strategi Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah:
 - Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan pembentukan desa tangguh bencana guna

meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana

Selain arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menetapkan arah kebijakan ekonomi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

- 1. Pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi proyek-proyek strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2019).
- 2. Mengatasi scarring effect masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- 3. Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak dan minyak hewan/nabati, tembaga, produk-produk kayu, serta ikan dan udang.
- 4. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan logistik pangan serta peningkatan kegiatan padat karya.
- 5. Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (optimalisasi *incubator centre*, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan (program subsidi bunga, pembiayaan alternatif lainnya), penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha KUKM,

- perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan *sharing program* yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.
- 6. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.
- 7. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur.
- 8. Penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk-produk pertanian.
- 9. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan serta penyediaan akomodasi.
- 10. Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih ke arah sisi *supply* dan produksi (e-commerce, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal.

- 11. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Instalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perizinan Pertambangan.
- 12. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak Covid-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), penguatan promosi dan misi dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.

Pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan dirasakan hingga akhir tahun 2023, oleh karena itu guna menanggulangi dan mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 di Jawa Timur, beberapa kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan kesehatan akan dilakukan, diantaranya:

- 1. Menjaga stabilitas sistem keuangan;
- 2. Pembangunan infra aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
- 3. Membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
- 4. Optimalisasi desain program padat karya, ketersediaan listrik bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS, dan PLTMH serta percepatan Perizinan Pertambangan.

- 5. Pemulihan Produktivitas Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19 (Pelatihan, stabilisasi harga, standarisasi produk, penguatan promosi, dan aspek lainnya).
- 6. Peningkatan kualitas produk UMKM
- 7. Akselerasi pembangunan kepariwisataan
- 8. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi

Selanjutnya guna lebih terarah, telah ditentukan Tema Pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan melalui target/ proyeksi capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

NT -	Indikator Kinerja	Realisasi			Kondisi	Target		
No	Utama	2019	2020	2021		2022	2023	
1	Pertumbuhan	5,52	-2,39	2.57	Awal	5,59-5,61	5,62-5,64	
1	Ekonomi	5,52	-2,39	,39 3,57	Perubahan	3,42-5,12	3,45-5,15	
					Awal	0,4433 - 0,4352	0,4353 - 0,4272	
2	Indeks Theil	0,3179	0,3077	0,312	Perubahan	0,32040- 0,31463	0,31462- 0,30162	
3	Persentase	10.0	11.46	10.50	Awal	9,76-9,34	9,33-8,91	
3	Penduduk Miskin	10,2	11,46	10,59	Perubahan	10,96-10,39	10,77-10,08	
4	Indeks Gini	0,364	0,364	0,364	Awal	0,3682 - 0,3677	0,3676 - 0,3671	
4	ilideks Gilli	0,304	0,304	0,304	Perubahan	0,3682 - 0,3677	0,3676 - 0,3671	
_	Indeks	00.01	01.07	01.67	Awal	90,85 - 90,86	90,87 - 90,88	
5	Pembangunan Gender	90,91	91,07	91,67	Perubahan	91,11 -91,17	91,13 -91,19	
	Indeks			70.14	Awal	72,58 -73,07	73,08 -73,57	
6	Pembangunan Manusia	71,5	71,71	72,14	Perubahan	72,58 -73,07	73,08 -73,57	
7	Tingkat	3,82	5,84	5,74	Awal	3,74- 3,71	3,70- 3,68	
	Pengangguran	3,62	3,04	5,74	Perubahan	5,42-3,83	5,41-3,82	

N.	Indikator Kinerja		Realisasi		Kondisi	Tar	get
No	Utama	2019	2020	2021		2022	2023
	Terbuka						
8	Indeks Reformasi	73,83	76.38	76,71	Awal	81,02-82,01	82,02-83,01
0	Birokrasi	13,63	70,36	70,38 70,71	Perubahan	77,76-78,71	78,72-79,67
	Indeks Kesalehan		6 63,50 66,33	Awal	62,83-62,92	62,93-63,02	
9	Sosial	63,26		66,33	Perubahan	63.79-63.88	63,89-63,97
10	Indeks Kualitas	67,10	67,70	69.40	Awal	67,48-67,84	67,85-68,21
10	Lingkungan Hidup	07,10	07,70	68,49	Perubahan	64,35 - 64,39	64,40 - 64,44
11	Indeks Risiko	137,88	126.42	117,26	Awal	149,7 - 148,7	148,7 - 147,7
11	Bencana	131,00	120,42	117,20	Perubahan	123,42-122,42	122,41-120,42

Sumber: Bappeda Prov. Jatim dan Perubahan RPJMD Prov. Jatim Tahun 2019-2024

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek

Penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ttrenggalek tahun 2023 sebagaimana dijelaskan diatas juga mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Berikut keterkaitan tema pembangunan tahun 2023 antara RKP tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sebagaimana dijabarkan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel III. 2 Keterkaitan Tema Pembangunan Tahun 2023

TEMA RKP TAHUN 2023	TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023	TEMA RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023
"PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"	"PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING DAERAH DALAM MENYAMBUT ERA INDUSTRY PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS AGRO	"TRANSFORMASI EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI SDM INOVATIF, KOLABORATIF SERTA INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN"

Sedangkan keterkaitan prioritas pembangunan tahun 2023 antara RKP tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

PRIORITAS RKP TAHUN 2023	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	
1.Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya; 2.Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB Industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB Pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i)pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB.	 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Meningkatnya Nilai Tambah KUKM Meningkatnya nilai tambah pariwisata Penguatan Konektivitas Antar	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Mengembangkan Wilayah untuk	Wilayah dalam Upaya	
Mengurangi Kesenjangan dan	Pemerataan Hasil Pembangunan	
Menjamin Pemerataan	Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	
1.Meningkatnya pertumbuhan	Meningkatnya konektivitas	
ekonomi dan tingkat kesejahteraan	jaringan Transportasi Darat,	
masyarakat di Kawasan Timur	Laut dan Udara	
Indonesia (KTI) dengan mendorong		

- (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks pembangunan Manusia IPM di KTI serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI
- 2.terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- 1.Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK)
- 2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial
- 3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi stunting (b) insiden tuberkulosis, (c) angka kematian ibu prevalensi obesitas penduduk > 18 Tahun (d) persentase perokok usia 10 18 tahun (e) meningkatkan nilai rata rata PISA (membaca, matematika, sains), (f) rata rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas serta (g) harapan lama sekolah.
- 4.Meningkatnya kualitas anak perempuan Dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) indeks pembangunan gender (IPG) dan, (c) indeks pembangunan pemuda (IPP).
- 5.Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin Dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin Dan rentan yang memiliki aset produktif.
 6.Meningkatnya produktivitas Dan

Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan

- 1. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan
- 2. Meningkatnya Kemandirian PMKS
- 3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
- 4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
- 5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 6. Menurunnya Pengangguran
- 1.Pemulihan ekonomi utamanya sektor-sektor yang terdampak COVID-19
- 2.Peningkatan kunjungan wisata melalui optimalisasi pengelolaan Desa Wisata yang terintegrasi
- 3.Peningkatan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberdayakan semua potensi lokal yang ada
- 4.Upaya penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama dan melibatkan semua pihak
- 5.Optimalisasi akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya serta peningkatan peran serta stakeholder dalam dalam upaya pemberdayaan masyarakat
- 6.Penumbuhan wirausaha baru, diutamakan untuk kelompok usia produktif, perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya
- 7.Pelayanan prima kepada masyarakat berorientasi pada penguatan sumberdaya aparatur dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 8.Pembangunan manusia

daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class University (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi serta (d) peningkatan peringkat global innovation index. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 1.Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan indek capaian revolusi mental 2.Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indek pembangunan kebudayaan 3.Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian indek pembangunan masyarakat. 4.Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indek kerukunan umat beragama 5.Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan 6.Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat harmonasyarakat harmonasyar	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal 1. Meningkatnya Kepedulian Sosial 2. Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah 5. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 6. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	yang berlandaskan pada Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan 9.Pembangunan Karakter
untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong		
pencapaian nilai budaya literasi Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	
1.Konsolidasi Demokrasi 2.Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3.Penegakan Hukum Nasional yang Mantap 4.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	

Nasional		
Memperkuat Infrastruktur untuk	Peningkatan Kemandirian	
Mendukung Pengembangan	Pangan, dan Pengelolaan	
Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Sumber daya Energi	
1.Meningkatnya penyediaan	Meningkatnya Kualitas	
	Infrastruktur Dasar dan	
infrastruktur layanan dasar		
dengan mendorong peningkatan	Sumber Daya Air	
(a) rumah tangga yang menempati	2. Meningkatnya Aksesibilitas	
hunian layak dan terjangkau (b)	Infrastruktur	
pemenuhan kebutuhan air baku	Ketenagalistrikan	
(kumulatif, persen) (c) luas daerah	3. Meningkatnya Pemanfaatan	
irigasi premium yang	Teknologi Informasi	
dimodernisasi (kumulatif, persen)	Komunikasi	
dan (d) mendorong penurunan		
rasio fatalitas kecelakaan jalan per		Peningkatan
10.000 kendaraan terhadap angka		pembangunan
dasar (2010)		infrastruktur dasar dan
2.Meningkatnya konektivias untuk		
mendukung kegiatan ekonomi dan		berwawasan lingkungan
akses menuju pelayanan dasar		
dengan mendorong peningkatan		
(a) waktu tempuh pada jalan lintas		
utama terpadu (jam/100KM) dan		
(b) persentase rute pelayaran yang		
saling terhubung (loop)		
3. Meningkatnya layanan		
infrastruktur perkotaan dengan		
mendorong kenaikan jumlah kota		
metropolitan dengan sistem		
angkutan umum massal perkotaan		
L vang dihangun dan dikembangkan		
yang dibangun dan dikembangkan		
(Kota)	Paningkatan Katahanan	1 Dembanginan
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup,	Peningkatan Ketahanan	1.Pembangunan
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Bencana dan Kualitas	infrastruktur yang
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	infrastruktur yang menunjang daya saing
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi: • Aspek Tingkat
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi: • Aspek Tingkat Pemerintahan dan
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi: • Aspek Tingkat Pemerintahan dan kewenangan
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi: • Aspek Tingkat Pemerintahan dan kewenangan (Pemerintah Pusat,
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi: • Aspek Tingkat Pemerintahan dan kewenangan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi: • Aspek Tingkat Pemerintahan dan kewenangan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa);
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi: • Aspek Tingkat Pemerintahan dan kewenangan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa); • Aspek Pendanaan
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi: • Aspek Tingkat Pemerintahan dan kewenangan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa); • Aspek Pendanaan (APBN, APBD
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim 3.Pembangunan Rendah Karbon	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2.Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon dengan fokus pembangunan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
(Kota) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon dengan fokus pembangunan Energi Berkelanjutan, Pemulihan	Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap	infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi 2. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:

dan Laut	(sistem
	pengembangan
	wilayah dan
	kawasan rawan
	bencana);
	Aspek Hukum
	(Status Lahan,
	Kesesuaian Tata
	Ruang dan Legalitas
	Pengelolaan).

3.3.1 Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

BIDANG		INDIKATOR	PERANGKAT	PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS
URUSAN	PROGRAM	KINERJA	DAERAH	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas		Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	pengentasan kemiskinan
		ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		Pengentasan Kemiskinan	
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			

BIDANG		INDIKATOR	PERANGKAT	PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS
URUSAN	PROGRAM	KINERJA	DAERAH	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
		dan B				
		Persentase	Dinas			
		Satuan	Pendidikan,			
		Pendidikan	Pemuda Dan			
		Non Formal	Olahraga			
		(SKB, PKBM				
		dan Kursus) yang				
		terakreditasi				
		Persentase Satuan PAUD	Dinas Pendidikan,			
		Negeri yang	Pemuda Dan			
		mempunyai	Olahraga			
		sarana dan				
		prasarana				
		sesuai standar	Dinas			
		Persentase Satuan	Pendidikan,			
		Sekolah Dasar	Pemuda Dan			
		(SD) Negeri	Olahraga			
		yang	Į			
		mempunyai				
		sarana dan				
		prasarana sesuai standar				
		Persentase	Dinas			
		Satuan	Pendidikan,			
		Sekolah	Pemuda Dan			
		Menengah Pertama (SMP)	Olahraga			
		Negeri yang				
		mempunyai				
		sarana dan				
		prasarana				
		sesuai standar				
		Persentase Satuan	Dinas Pendidikan,			
		Pendidikan	Penuda Dan			
		Non Formal	Olahraga			
		Negeri yang				
		mempunyai				
		sarana dan				
		prasarana				
		sesuai standar Tingkat	Dinas			
		Partisipasi	Pendidikan,			
		sekolah	Pemuda Dan			
		penduduk usia	Olahraga			
		7-18 tahun				
		pada Satuan Pendidikan				
		Non Formal				
		(Kesetaraan/K				
		ursus)				
		Tingkat	Dinas			
		Partisipasi	Pendidikan,			
		sekolah penduduk usia	Pemuda Dan Olahraga			
		7-12 tahun	Ciaiiiaga			
		pada Satuan				
		Pendidikan Formal				
		SD/Sederajat				
		Tingkat	Dinas			

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
ONOGAN		Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederaj at	Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	MASIONAL	TROVING	NADOLALDA
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan
		Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SD sesuai ketentuan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		aan, serta Pengentasan Kemiskinan	kemiskinan
		Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SMP sesuai ketentuan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	pengentasan kemiskinan
		ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan
		Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan, Pengendalian		aan, serta Pengentasan Kemiskinan	kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
URUSAN		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar	Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
		Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	Berencana			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan

BIDANG URUSAN Dan	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL Ketahanan	PRIORITAS PROVINSI Lingkungan	PRIORITAS KABUPATEN berwawasan
Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Daerah Kabupaten/K ota	yang difasilitasi		Bencana, dan Perubahan Iklim	Hidup	lingkungan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
	Program Penanggulang an Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
		Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Iklim		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
	Program	Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Momporlayot	Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pencegahan, Penanggulang	Persentase pencegahan, penanggulanga	Satuan Polisi Pamong Praja Dan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban	Meningkatkan pembangunan infrastruktur

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
OKOGIN	an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	n, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kebakaran	dan Transformasi Pelayanan Publik	Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	dasar dan berwawasan lingkungan
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
	Program Pemberdayaa n Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	kemiskinan Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pemerintahan Daer Kabi ota Prog Perer Tena	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase ketersedian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja		Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	pengentasan kemiskinan
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang	Dinas Perindustrian Dan Tenaga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Peningkatan Kualitas Pendidikan,	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
OKOSAN		ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Kerja	Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesehatan, P Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaa n Perempuan	Persentase pencapaian prasyarat PUG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pelembagaan PHA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI Pengentasan Kemiskinan	PRIORITAS KABUPATEN
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase layanan perlindungan khusus anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber daya Energi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber daya Energi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan	Dinas Pertanian Dan Pangan	Berkeadilan		pengentasan kemiskinan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase terselesaikann ya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber daya Energi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber daya Energi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan		masyarakat di Jawa Timur	kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH Sipil	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil			
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilayani	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung
		Persentase layanan pendaftaran penduduk yang diselenggaraka n	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil		Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil yang diselenggaraka n Persentase pencatatan sipil yang dilayani	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Profil Kependuduka n	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Mengembangk an Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset	Dinas Pemberdayaan		Pembanguna n Serta	pengentasan kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA dalam kondisi baik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	PERANGKAT DAERAH Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI Peningkatan Layanan Infrastruktur	PRIORITAS KABUPATEN
	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status IDM desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Mengembangk an Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan perjanjian kerja sama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Mengembangk an Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Mengembangk an Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat desa yang difasilitasi pemberdayaan nya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Mengembangk an Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah data kependudukan paripurna yang terbentuk di kampung kb	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
Berencana		Persentase kampung kb mandiri	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	NASIONAL	Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mcpr) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Publik	penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
		Persentase layanan publik yang diselenggaraka n secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika			
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Berkeadilan	Sekunder dan Pariwisata	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan			
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS)	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kot	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
ONODIA		a yang diawasi dan diperiksa secara on-site atau off-site	J.I.J.G.II	Berkeadilan	Sekunder dan Pariwisata	pengentasan kemiskinan
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan kategori minimal cukup sehat	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kot a	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengembanga n Umkm	Persentase usaha mikro yang dikembangkan	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase nilai aset dalam kondisi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Dan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
OKO SIM		baik	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MISIONIE	TROVINGE	IMADOT TIT DA
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		perangkat daerah				
	Program Pengembanga n Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kenaikan izin terbit	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengolahan data, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang	Program Pengembanga n Kapasitas	Jumlah pemuda wirausaha	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Peningkatan Kualitas Pendidikan,	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
Kepemudaan Dan Olahraga	Daya Saing Kepemudaan	yang aktif berusaha	Olahraga	Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet olahraga yang berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengembanga n Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dikembangkan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggara an Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembanga n Kebudayaan Program	Persentase adat/budaya yang dikelola	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Meningkatkan
	Pengembanga	kesenian yang	Pariwisata	Mental dan	Kepedulian	SDM unggul

BIDANG URUSAN	PROGRAM n Kesenian Tradisional	INDIKATOR KINERJA di kembangkan	PERANGKAT DAERAH Dan Kebudayaan	PRIORITAS NASIONAL Pembangunan Kebudayaan	PRIORITAS PROVINSI Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	PRIORITAS KABUPATEN inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Publik	Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan Persentase	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan	Kearsipan Dan Perpustakaan	2 40222	Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
ONOGIN		akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban nasional	Subiduit	Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan
		nilai aset dalam kondisi baik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perikanan Dinas Perikanan		dan Pariwisata	kemiskinan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
			J.12.11.1		dan Pariwisata	kemiskinan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Dinas Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah sasaran lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Dinas Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil perikanan	Dinas Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Berkeadilan	Sekunder dan Pariwisata	pengentasan kemiskinan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang terkelola	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemasaran	Lama tinggal wisatawan	Dinas Pariwisata	Memperkuat Ketahanan	Pemulihan Ekonomi	Meningkatkan SDM unggul

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
OKOGIN	Pariwisata	1111/2/1011	Dan Kebudayaan	Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan	inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengembanga n Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekraf yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Ekonomi SDM ungg Kerakyatan inovatif da melalui kolaborat Peningkatan menduku: Nilai Tambah kemandiri	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Pertanian Dan Pangan	Berkeadilan	Sekunder dan Pariwisata	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Pertanian Dan Pangan			
	Program Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian	Persentase produktivitas hasil pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
				Berkeadilan	Sekunder dan Pariwisata	pengentasan kemiskinan
	Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Peternakan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Peternakan	Berkeadilan	Sekunder dan Pariwisata	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Peternakan			
	Program Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian	Jumlah populasi ternak besar	Dinas Peternakan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian
		Jumlah populasi ternak kecil	Dinas Peternakan	dan Berkeadilan	Sektor Sekunder dan	ekonomi dan pengentasan kemiskinan
		Jumlah populasi unggas Pelestarian	Dinas Peternakan Dinas		Pariwisata	
		dan pengembangan sapi nggalekan	Peternakan			
		Jumlah hewan yang dipelihara	Dinas Peternakan			
	Program Penyediaan	Persentase tersedianya	Dinas Peternakan	Memperkuat Ketahanan	Pemulihan Ekonomi	Meningkatkan SDM unggul

BIDANG URUSAN	dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	INDIKATOR KINERJA (dibangun/dire habilitasi/dipel ihara) Prasarana Peternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan Persentase	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PRIORITAS PROVINSI Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	PRIORITAS KABUPATEN inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	kelahiran hasil IB Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis Jumlah unit usaha hewan	Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program	dan produk hewan yang didampingi Jumlah kebutuhan obat puskeswan yang dicukupi Persentase izin	Dinas Peternakan Dinas	Memperkuat	Pariwisata Pemulihan	Meningkatkan
	Perizinan Usaha Pertanian	usaha peternakan yang lengkap perizinannya	Peternakan	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah yang dibangun/dire vitalisasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase distributor dan kios/ pengecer pupuk bersubsidi yang tertib administrasi Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program	pokok dan barang penting Persentase	Dinas	Memperkuat	Pemulihan	Meningkatkan

BIDANG URUSAN	PROGRAM Pengembanga n Ekspor	INDIKATOR KINERJA promosi dagang yang diikuti	PERANGKAT DAERAH Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	PRIORITAS NASIONAL Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PRIORITAS PROVINSI Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	PRIORITAS KABUPATEN SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapann ya) yang terstandar	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase capaian sasaran pembangunan industri kabupaten	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan industri terkait	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj aan, serta Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Sekretariat Daerah	Program Penunjang	Cakupan pelayanan jasa	Sekretariat Daerah	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Ketentraman,	Meningkatkan SDM unggul

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	administrasi perkantoran yang difasilitasi		Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Sekretariat Daerah			
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sekretariat Daerah			
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan administrasi tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Sekretariat DPRD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Sekretariat DPRD		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD			
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Sekretariat DPRD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
ONOGIN	Fungsi DPRD	Fungsi DPRD yang dilaksanakan	Dibani	Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembanga n Daerah Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembanga n Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembanga n Daerah			
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembanga n Daerah Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembanga n Daerah Badan Pergembanga n Daerah Badan Perencanaan Pengembanga n Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembanga n Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA 80% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	PERANGKAT DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembanga n Daerah	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI di Jawa Timur	PRIORITAS KABUPATEN
Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Badan Keuangan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase	Badan Keuangan Daerah Badan		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keuangan Daerah			
		Persentase dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan Daerah			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan BMD	Badan Keuangan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan asli daerah	Badan Keuangan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
OKOSAN		AMEROA	DADICALI	Publik	Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Badan Kepegawaian Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Badan Kepegawaian Daerah		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan Kepegawaian Daerah			
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks tata kelola manajemen ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Pendidikan Dan Pelatihan	Program Pengembanga n Sumber Daya Manusia	Indeks penurunan gap kompetensi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Penelitian Dan Pengembanga n	Program Penelitian dan Pengembanga n Daerah	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembanga n Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Inspektorat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA Persentase nilai aset dalam kondisi baik	PERANGKAT DAERAH Inspektorat	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	PRIORITAS KABUPATEN pengentasan kemiskinan
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat			
	Program Penyelenggara an Pengawasan	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	Inspektorat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga n dan Asistensi	Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	Inspektorat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
		Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	Inspektorat		Timur	
Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Trenggalek	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Kecamatan Trenggalek		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Trenggalek			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Trenggalek	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
ONO SAIN	Pelayanan Publik	publik yang dilaksanakan	J. J	Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Trenggalek	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Trenggalek	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Trenggalek	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase	Kecamatan Panggul	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan
		nilai aset dalam kondisi baik Persentase	Panggul Kecamatan		masyarakat di Jawa Timur	kemiskinan
		ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Panggul			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang	Kecamatan Panggul	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian

BIDANG URUSAN	PROGRAM Publik	INDIKATOR KINERJA dilaksanakan	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL Publik	PRIORITAS PROVINSI Pelayanan Publik bagi	PRIORITAS KABUPATEN ekonomi dan pengentasan
					masyarakat di Jawa Timur	kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Panggul	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Panggul	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Panggul	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Suruh	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Kecamatan Suruh		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
	D	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Suruh	No.		
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Suruh	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
					Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Suruh	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Suruh	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Suruh	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Durenan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Necamatan Durenan Kecamatan Durenan		masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	perangkat daerah Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Durenan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
					masyarakat di Jawa Timur	kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Durenan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Durenan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Durenan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Pogalan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase	Kecamatan Pogalan Kecamatan		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pogalan			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Kecamatan Pogalan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
					di Jawa Timur	
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Pogalan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Pogalan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Pogalan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Watulimo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Kecamatan Watulimo		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Watulimo			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Kecamatan Watulimo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Watulimo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Timur Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Watulimo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Tugu	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
	nilai dalai baik		Kecamatan Tugu		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Kecamatan Tugu	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Tugu	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase laporan hasil penyelenggara an urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kecamatan Tugu	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Tugu	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Dongko	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Kecamatan Dongko		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Dongko			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Dongko	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Dongko	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program	Persentase	Kecamatan	Memperkuat	Peningkatan	Meningkatkan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
OKOGAN	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	konflik yang ditindaklanjuti	Dongko	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Dongko	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Kampak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	Kecamatan Kampak Kecamatan Kampak		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Kampak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Kampak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi	Persentase konflik yang	Kecamatan Kampak	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Ketentraman,	Meningkatkan SDM unggul

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	ditindaklanjuti		Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Kampak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Munjungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase	Kecamatan Munjungan Kecamatan		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		ketersentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Munjungan			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Munjungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Munjungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman	Persentase konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Munjungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
ONOGRA	dan Ketertiban Umum	111121011	Susidin	dan Transformasi Pelayanan Publik	Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Munjungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase	Kecamatan Pule Kecamatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan
		nilai aset dalam kondisi baik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pule Kecamatan Pule		masyarakat di Jawa Timur	kemiskinan
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Pule	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Pule	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan	Persentase konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Pule	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Ketertiban Umum			Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Pule	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Gandusari	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Kecamatan Gandusari		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gandusari			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Gandusari	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Gandusari	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Gandusari	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Umum			Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Gandusari	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Bendungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Kecamatan Bendungan			pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Bendungan			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Bendungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Bendungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Bendungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
ONO STATE			2.12.13.11	Publik	Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Bendungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Kecamatan Karangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Kecamatan Karangan		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Karangan			
	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan Karangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	Kecamatan Karangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	Kecamatan Karangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
OTTO SAIL			<i>D.</i> 1. B. 10.11	112101112	Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kecamatan Karangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Politik dan Pengembanga n Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik , pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakat an	Persentase Ormas yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
					Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	pengentasan kemiskinan
	Program Pembinaan dan Pengembanga n Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase konflik SARA yang tertangani	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dasar	Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pembangunan /pemeliharaan /perkuatan tebing kali/sungai dan bangunan lainnya sebagai pengendali banjir	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
		Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		Infrastruktur	
	Program	Persentase	Dinas	Memperkuat	Penguatan	Meningkatkan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
0.000.1	Penataan Bangunan Gedung	bangunan gedung negara yang dibangun dan direhabilitasi	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Penataan Bangunan dan Lingkunganny a	Persentase dokumen penataan bangunan yang disusun	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Penyelenggara an Jalan	Persentase kemantapan jalan kabupaten Persentase jembatan berfungsi baik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengembanga n Jasa Konstruksi	Persentase pengendalian penyelenggara an jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Persentase dokumen RRTR yang disusun	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan

BIDANG URUSAN	PROGRAM Air Minum	INDIKATOR KINERJA perpipaan dan non perpipaan	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL Pelayanan Dasar	PRIORITAS PROVINSI Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PRIORITAS KABUPATEN
	Program Pengembanga n Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase penduduk yang terlayani penanganan sampah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
	Program Pengembanga n Perumahan	Persentase rumah korban bencana alam yang terdata	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase perbaikan RTLH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penduduk yang terlayani PSU perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian permasalahan sengketa tanah garapan pada kawasan hutan dan non kawasan hutan Persentase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
		kegiatan pengurusan pelepasan kawasan hutan untuk penyelesaian sengketa	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		Layanan Infrastruktur	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
UKUSAN		tanah dan pembangunan	DAERAH	NASIONAL	PROVINSI	RABUPATEN
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Luas tanah yang terbebaskan untuk pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
		Persentase fasilitasi pelaksanaan dan permasalahan pengadaan tanah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dasar	Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah rencana lokasi pendataan subyek dan tanah obyek reforma agraria	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah lokasi pendataan tanah kosong, tanah timbul, tanah negara dan tanah aset pemerintah yang belum tertitle hak	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
		Jumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/K epemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		Peningkatan Layanan Infrastruktur	
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase pengurusan penggunaan kawasan hutan untuk PSN dan PSD Jumlah lokasi pendataan tanah negara bebas untuk pengendalian pemanfaatann ya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah lokasi pendataan penggunaan tanah untuk rencana	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA pembangunan serta kepentingan lainnya Jumlah lokasi	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PRIORITAS PROVINSI Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan	PRIORITAS KABUPATEN lingkungan
		pemetaan lokasi zona nilai tanah Jumlah kajian	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas		Layanan Infrastruktur	
		lokasi rencana konsolidasi tanah (kec)	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terlaksana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik yang terkelola	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Peningkatan Pendidikan,	Persentase penyelenggara an pendidikan,	Dinas Perumahan, Kawasan	Membangun Lingkungan Hidup,	Peningkatan Ketahanan Bencana dan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
OROGAN	Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	pelatihan, dan penyuluhan kepada lembaga kemasyarakata n	Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Kualitas Lingkungan Hidup	dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait PPLH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	Dinas Perhubungan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan	Dasar	Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Perhubungan		Infrastruktur	
	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU)	Dinas Perhubungan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan
		Persentase layanan angkutan darat Persentase	Dinas Perhubungan Dinas	Dasar	Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	
		kendaraan wajib uji yang	Perhubungan		don direct	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
		melakukan Uji Kir				
		Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Dinas Perhubungan			
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase kelaikan kapal	Dinas Perhubungan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembanguna n Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan

3.4. Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.4.1. Program Prioritas RPJMD Periode Tahun 2021 - 2026

Progam prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2021-2026. Penjabaran program prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Roket Ekonomi

Roket Ekonomi merupakan Program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu "Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Dan Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Wirausahawan Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren". Pencapaian misi tersebut menggunakan pendekatan tujuan "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif

dan kreatif" dan "Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial".

Tabel III. 4 Program Prioritas Roket Ekonomi

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Dete	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (KOMIDAG)
	Data UMKM/Big Data	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (PERINAKER)
UMKM		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
	Standarisasi Sertifikasi Branding e-Marketplace	Program Pengembangan UMKM Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Komidag Dinas Perinaker
	e-LPSE	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Smart Farming Revitalisasi HIPPA Peningkatan kapasitas Kelompok (Gapoktan) BUMP (Badan Usaha Milik Petani)	Program Penyuluhan Pertanian	
AGRO	Good Agriculture Practise Good Handling Practise Good Manufacturing Practise LMDH - utilisasi lahan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian Dinas Peternakan
	Incentive	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Keperantaraan Pasar	Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
PERIKANAN	e-lelang TPI	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Eco- aquaculture	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
INVESTASI	Lelang Investasi Investors Gathering (Hospitality) Promosi Investasi Jemput Bola	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)
	Perizinan (PERANGKAT DAERAH - Kecamatan /Paten)	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Sekolah Bisnis / Klinik Bisnis	 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 	 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
	Penumbuhan wirausaha muda	 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pendidikan Dan 	 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan
WIRAUSAHA	Penumbuhan wirausaha perempuan	Latihan Perkoperasian 4. Program Penempatan Tenaga Kerja 5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tenaga Kerja 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian
	Rumah Kurasi/ Kreatif	Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
PENINGKATAN PAD	Basis Data Pajak (Big Data) Café Pelayanan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bakeuda Dinas PMPTSP
	Smart Collection - incentive	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BAkeuda
	Kerjasama antar Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

2. Roket Pariwisata

Percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten dalam Roket Pariwisata. Trenggalek diwujudkan Roket pariwisata merupakan katalis terwujudnya (leverage) trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa. Roket pariwisata yang bertumpu pada destinasi unggulan, desa wisata dan branding promotion kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH. Adapun matriks collaborative tourism development dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 5 Program Prioritas Roket Pariwisata

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Accommodation and Restaurant Services	Redesign- reconceptLand banking	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
Resource and	Dukungan untuk desain	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Space Planning	konsep dan teknis desa		
 Sanitation and Health Cleanliness 	wisata	Program pengelolaan persampahan	Dinas PKPLH
Respect for The Environment and Human Heritage		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Paribud
Infrastructure and Public Services Sufficiency		Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKPLH
Harmonious Destination	Mobility hub	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
Quality Connectivity		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program aplikasi informatika	Dinas Kominfo
Local hospitality Reasonable price	Hospitality	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
Appropriate Interpretation	Market place, target	Program pemasaran pariwisata	Dinas Paribud
	Desain media promosi	Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Kominfo
Finance	 Lelang investasi Crowd funding Crowd sourching 	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
Community Perception of Security	Komunitas kreatif pecinta wisata	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
3. Organization /leadership		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas PMD
Collaborative	100 dewi terintegrasiKonsolidasi	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
	event	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bag pemerintahan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag Perekonomian

3. Roket Desa

Roket desa yang bertumpu pada inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan tata kelola desa kemudian diwujudkan

dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH. Adapun matriks hubungan antara program ikon dengan program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 6 Program prioritas Roket Desa

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Governance	 Perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan akuntabel Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemanfaatan SID untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan 	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD
	Penanganan masalah sosial UPZ dan PUSKESOS	 Program rehabilitasi sosial Program pemberdayaan sosial Program perlindungan jaminan sosial 	Dinas Sosial PPPA
	Soetran AwardLomba desa	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD
	Adipura Desa	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas PKPLH
Village Innovation	SEPEDA KEREN	 Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan Program pemenuhan hak anak (PHA) 	Dinas Sosial PPPA
	PATRIOT DESA	 Program administrasi pemerintahan desa Program penataan desa 	Dinas PMD
Economic development	Klinik BUMDes/BUMDes ma	 Program administrasi pemerintahan desa Program peningkatan kerjasama desa 	Dinas PMD

4. Roket SDM Kreatif

Roket SDM Kreatif merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada urusan

pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Roket SDM kreatif merupakan program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)". Roket SDM Kreatif merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan daerah lingkup roket SDM kreatif:

Tabel III. 7 Program Prioritas Roket SDM Kreatif

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
PENDIDIKAN	STEAM + Prestasi Voucher Belajar ke Luar Negeri Beasiswa Keren/Difabel	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Kesra
	Scout Talent	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
KESEHATAN	Insentif kesehatan bagi masyarakat – khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR) Index Kesehatan Keluarga erat dengan perempuan maka perlu Insentif bagi Ibu memeriksakan kandungan dan kehamilan, yang rutin memeriksakan anaknya ke posyandu,	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB
PELAYANAN PUBLIK	Big Data (Trenggalek Satu Data) Cakupan Jaringan Internet 100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Pengelolaan / Pengembangan Smart Centre	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
	Percepatan Layanan	 Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	digital bagi pelayanan publik (adminduk, Kesehatan,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB
	Pendidikan, Perijinan, sosial)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial P3A
	Digitalisasi dan Interoperability Sistem layanan, pengembangan Arfificial Intelegent untuk perencanaan, penganggaran,	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
	monev (e-system)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda
	Merit Systems	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan SDM	BKD

5. Roket Infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan

pada generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka pembangunan infrastruktur. Dalam penerapanya terdapat program prioritas kewilayahan antara lain sebagai berikut :

Tabel III. 8 Program Prioritas Kewilayahan

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Transportasi		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
Air dan Sanitasi		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PKPLH
Persampahan	Creative City, Front Beach City, Little Jogja, Culture Heritage	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas PKPLH
	City	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman	Dinas PKPLH
Ruang Terbuka Hijau		Hayati (Kehati) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Sedangkan program prioritas untuk pembangunan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut :

Tabel III. 9 Program Prioritas Infrastruktur Dasar

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Angkutan Gratis	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Pendidikan	Sekolah Komunitas	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati	Dinas PKPLH
	Creativity Lab	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Air dan Sanitasi	Penyediaan Air bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PKPLH
Persampahan	Waste Management	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PKPLH
Kesehatan	- RS Panggul - RS Watulimo - Perluasan Pelayanan Psc 119	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Dalduk KB

Adapun selanjutnya untuk program prioritas pembangunan lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel III. 10 Program Prioritas Pembangunan Lingkungan

Pilar	Program Icon		Program Pembangunan Daerah		PERANGKAT DAERAH
Ruang Terbuka Hijau		Ruang Terbuka Hijau	Program Pencemaran	Pengendalian Dan/Atau	Dinas PKPLH

Pilar	ar Program l		Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
			Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Konservasi Sumber Daya Air		Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PKPLH
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dillas I KI LII
Pedestrian, Jalur Sepeda		Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
Industrial Estate		Industrial Estate	Program perencanaan dan pembangunan Industri	Dinas Perinaker

3.4.2. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan Transformasi Ekonomi

Kabupaten Trenggalek terdampak pandemi Covid-19 baik di sektor kesehatan dan ekonomi. Kasus pertama Covid-19 dipublikasikan pada tanggal 6 April 2020 dan disebut sebagai pasien 01 Trenggalek. Pasien tersebut merupakan warga Kabupaten Trenggalek yang sebelumnya tercatat di Kabupaten Tulungagung dan merupakan pasien ke 175 di Jawa Timur. Pada saat itu, Bupati Trenggalek langsung mengambil tindakan berupa penerapan isolasi mandiri di rumah karena dalam keadaan sehat. Per

November 2021, sejumlah 8.202 orang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan rincian jumlah pasien aktif 0,17%, pasien sembuh 87,04% dan meninggal 12,79%. Sektor ekonomi juga mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Terhitung pada akhir 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Trenggalek terkonfirmasi -2,17 %. Semua sektor ekonomi juga terdampak seperti sektor perikanan, pertanian, UMKM, IKM, pariwisata dan peternakan. Sektor ekonomi terdampak negatif yang paling besar (>98%) adalah IKM, UMKM dan perikanan sedangkan sektor terdampak paling kecil adalah sektor pertanian (77%).

Untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat maka rumah sakit yang berkualitas mutlak diperlukan. Salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek adalah RSUD dr. Soedomo. Rumah sakit juga merupakan fasilitas *health security* untuk mengantisipasi terjadinya pandemi/wabah seperti Covid-19 yang melanda dunia akhir-akhir ini. Pandemi Covid-19 juga memberi pelajaran berharga bahwa kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan harus mendapatkan prioritas pengembangan rumah sakit.

Pengembangan fasilitas rumah sakit dr. Soedomo tentunya membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Dengan terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Trenggalek, diperlukan alternatif sumber pendanaan lainnya salah melalui satunya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penggunaan dana pinjaman PEN di Kabupaten Trenggalek diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas (gedung) baru. Fasilitas baru akan meningkatkan standar pelayanan baik ketika terjadi

wabah dikemudian hari atau dalam kondisi normal. Ketika terjadi pandemi atau wabah, ketersediaan tempat tidur dengan standar 30% dan fasilitas pendukungnya juga telah siap. Ketika pasca pandemi Covid-19, jumlah tempat tidur baik kelas utama, standar maupun non kelas telah melebihi standar yang telah ditetapkan. Fasilitas (gedung) baru juga disiapkan sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap berbagai penyakit serius lainnya seperti KLB DBD.

Dengan adanya fasilitas baru, peluang peningkatan jumlah kunjungan pasien juga diprediksi meningkat dan diutamakan pasien yang berasal dari luar kabupaten. Akses pasien juga akan mudah. Dengan asumsi BOR 60-65%, pasien akan mudah mendapatkan tempat tidur (tidak ada antrian). Fasilitas baru yang disertai dengan peningkatan kualitas layanan medis juga potensial mendukung cita-cita mewujudkan RSUD dr. Soedomo untuk naik kelas (dari kelas C manjadi kelas B).

Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya UMKM dan pariwisata, karena kedua sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 perlu mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Pembangunan dan pemulihan berkelanjutan dapat mengurangi dampak bagi lingkungan di masa yang akan datang, serta mewujudkan ekonomi yang lebih tangguh, setara dan berkeadilan, serta memperluas lapangan kerja baru.

Adapun terkait prioritas pemulihan ekonomi utamanya sektor-sektor yang terdampak COVID-19 dilakukan dengan beberapa program diantaranya:

- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan UMKM
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata

- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
 Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
 Pertanian
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Perizinan Usaha Pertanian
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 Berikut beberapa kebijakan yang diupayakan

 Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2023 :

Tabel III. 11 Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
1	Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi	Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi kompetensi. Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan kerja dengan sertifikasi akreditasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Peningkatan sarana dan prasarana BLK	
2	Peningkatan penempatan tenaga kerja.	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	
3	Optimaslisasi informasi pasar kerja	Peningkatan informasi lowongan kerja	
		Pengembangan Job Center dan memperkuat sistem teknologi informasi penempatan serta menjalin kemitraan dengan pengguna	
4	Peningkatan pemberdayaan PMI purna	Peningkatan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan PMI purna	

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
5	Peningkatan peserta program	Peningkatan kepesertaan program	
	BPJS	BPJS ketenagakerjaan bagi	
		perusahaan dan tenaga kerja	
6	Peningkatan penyelesaian Hubungan Industrial	Mendorong penyelesaian hubungan industrial yang kondusif dan	
	Hubungan muustrar	mendorong pembentukan LKS	
		Bipartit, peraturan perusahaan dan	
		perjanjian kerja bersama.	
7	Penambahan kuota program	Peningkatan koordinasi dengan	
0	transmigrasi	pemerintah pusat dan provinsi	
8	Peningkatan kompetensi calon transmigran	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran	
9	Peningkatan standarisasi	Peningkatan fasilitasi merk, desain	
	produk Industri Kecil dan	kemasan, uji nutrisi, sertifikasi halal	
	Menengah (IKM)	-	
10	Pengembangan pembinaan	Peningkatan pembinaan dan pelatihan	
	dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
	dan Menengan (IKM)	serta pengembangan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
11	Peningkatan pengendalian	Mendorong pengendalian dan	
	dan pengawasan Industri	pengawasan pelaku Industri Kecil dan	
	Kecil dan Menengah (IKM)	Menengah (IKM) melalui Sistem	
12	Denie alastan Invalitas CDM	Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Vanansi dan
12	Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/	Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan
	UMKM/ Pedagang; dan	bagi pengawas/pengurus/anggota dan	Perdagangan
	Masyarakat Pelaku Usaha	pengelola koperasi secara terus	5 5
	lainnya) melalui Konsultasi	menerus	
	dan Pelatihan usaha	Melaksanakan sekolah pasar untuk	
	Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru	merubah perilaku dan menambah wawasan pedagang pada pasar yang	
	(Muda dan Perempuan)	telah direvitalisasi menuju pasar ber-	
	,	SNI	
13	Peningkatan kualitas	Pemberian rekomendasi usaha simpan	
	kelembagaan dan pengawasan	pinjam (USP); melakukan pengawasan	
	usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, permodalan	koperasi; memberikan hibah; fasilitasi kerjasama dengan lembaga	
	dan manajemen kelembagaan	permodalan serta kerjasama antar	
		koperasi	
14	Peningkatan kualitas dan	Mengadakan Teknologi Tepat Guna	
	kapasitas produksi usaha	(TTG), mendaftarkan merk, halal	
	melalui pemanfaatan modernisasi teknologi,	maupun HAKI (Standarisasi Produk), membimbing untuk kemasan baik	
	perbaikan kemasan, fasilitasi	branding maupun packaging,	
	Uji Nutrisi, Umur Simpan,	termasuk uji nutrisi di Sucofindo,	
	Sertifikasi Merk, Halal, SNI,	BPOM dan lembaga sejenis lainnya	
	BPOM, Standarisasi HAKI;		
	dan standarisasi usaha lainnya		
15	Penguatan Pemasaran dan	Melaksanakan fasilitasi pameran	
	jangkauan usaha baik secara	melalui pameran dan temu usaha	
	online maupun offline sampai	dengan pihak ketiga dan pengadaan IT	
1.0	tingkat ekspor produk	perkoperasian	
16	Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan	Melaksanakan kegiatan revitalisasi pasar melalui kegiatan yang	
	Pengembangan Sarana	bersumber dari APBD dan APBN	

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
	Prasarana Usaha		
17	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan	Memberikan rekomendasi izin usaha toko swalayan dan pemenuhan komitmen SIUP	
18	Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik secara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk	Pelaksanaan misi dagang untuk meningkatkan jangkauan pemasaran produk unggulan	
19	Pengembangan potensi perikanan berbasis kawasan	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Dinas Perikanan
20	Pengembangan usaha budidaya ikan berwawasan lingkungan	Pengembangan Eco-Aquaculture	
21	Peningkatan sarana prasarana Perikanan	Pemberian bantuan hibah sarana prasarana Perikanan	
22	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan	Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas KUB, Pokdakan dan Poklahsar	
23	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan secara partisipatif	Peningkatan kualitas kelembagaan Pokmaswas Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh <i>stakeholders</i>	
24	Peningkatan penerapan teknologi perikanan yang sesuai standar	Pelatihan dan pembinaan kelompok tentang teknologi terkini	
25	Implementasi tata niaga sektor perikanan yang berkeadilan	Implementasi e-Lelang TPI (Lelang Ikan <i>Online</i>)	
26	Optimalisasi Pengelolaan Tempat pelelangan Ikan	Peningkatan kinerja internal TPI maupun koordinasi dengan pihak eksternal	
27	Penerapan Standar operasional dan mutu usaha perikanan	Revitalisasi Sentra Industri Perikanan Bengkorok (Perpres 80/2019)	
		Fasilitasi standarisasi dan legalitas produk	
28	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Peningkatan Kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), utamanya pada wilayah stunting Optimalisasi FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)	
29	Diversifikasi Produk Olahan Perikanan	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pada Usaha Pengolahan Ikan	
30	Diversifikasi Produk Olahan Perikanan	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pada Usaha Pengolahan Ikan	
31	Peningkatan Ketersediaan Ikan	Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Pembangunan Pasar Ikan dan Sentra Kuliner Ikan Peningkatan moda pemasaran ikan	
32	Peningkatan kualitas dan	Peningkatan jumlah sertifikasi	Dinas Pertanian

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
	kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi usaha lainnya	pertanian (registrasi kebun, sertifikat organik, registrasi beras (PSAT)	dan Tangan
33	Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Pokyan/ Pokdakan/ Pohlahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha berkelanjutan untuk penumbuhan wirausaha baru (Muda dan Perempuan)	Penumbuhan wirausaha perempuan dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan Peningkatan kelas kelembagaan petani Peningkatan SDM petani miskin melalui APP bidang pertanian Pengembangan kapasitas kelembagaan petani (Revitalisasi HIPPA, pelatihan pupuk organik	
34	Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha	Penambahan luas tanam dan penyediaan sarana pra/pasca panen (bibit tanaman, pupuk, pestisida, hand tractor, cultivator, corn sheller, APPO,perajang tembakau, alat pasca panen kopi, dll)	
		Penyediaan prasarana pertanian (JUT, JITUT, IAT, DAM Parit, dll) Pengembangan kawasan agropolitan berbasis agribisnis Pelatihan penerapan Good Agriculture Practices (GAP) Pelatihan penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) Pelatihan penerapan Good Handling Practices (GHP)	
34	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan	Pembentukan lembaga keuangan mikro milik petani (BUMP)	
35	Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik secara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk	Peningkatan pemasaran melalui pameran, kontes, marketplace dan media sosial	
36	Penguatan kolaborasi intensif dan kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan besar melalui Keperantaraan Pasar	Peningkatan kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga penelitian, koperasi maupun lembaga swasta yang diikat dengan MoU	
37	Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perizinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses	Peningkatan metode pertanian cerdas berbasis teknologi (smart farming, pertanian terpadu, smart irigasi, smart green house dll) Pengembangan AUTP (Asuransi Usaha	

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
	kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor; e- lelang TPI; Smart Farming	Tani Padi)	
38	Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya	Peningkatan pengembangan TTP (Taman Teknologi Pertanian), STP (Science Techno Park) dan Pertanian Terpadu di masyarakat	
40	Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Pokyan/ Pokdakan/ Pohlahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru (Muda dan Perempuan)	Pembinaan dan pendampingan serta pengembangan kapasitas kelompok petani peternak; Peningkatan SDM Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui APP bidang peternakan; Peningkatan SDM peternakan terkait penerapan hygiene sanitasi dan kesrawan; Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan pada rumah tangga peternak.	Dinas Peternakan
41	Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha)	Penambahan penyediaan sarana (meliputi benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT), Alat - alat Peternakan, obat-obat hewan); Penambahan infrastruktur peternakan meliputi kandang ternak, gudang pakan, jalan produksi; Pengembangan sumber air untuk mini embung, Jaringan Irigasi air tanah dangkal dan dalam, Jaringan irigasi lahan hijauan pakan; Pengembangan dan pelestarian plasma nutfah sapi potong lokal Trenggalek rumpun "Sapi Galekan"	
42	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan	Pembinaan dan sosialisasi perizinan usaha peternakan Pendampingan fasilitasi permodalan (akses KUR dan CSR) Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan sertifikasi kesehatan hewan dan pelayanan veteriner Fasilitasi penerbitan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP	
43	Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi	Peningkatan kualitas bibit unggul ternak yang tersedia di masyarakat; Peningkatan dan pengawasan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak; Pengawasan mutu obat hewan; Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan.	

No.	Strategi	Kebijakan	OPD
44	Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik seara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk	Fasilitasi promosi dan kontes ternak; Fasilitasi peningkatan nilai tambah produk peternakan (sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).	
45	Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perizinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor; elelang TPI; Smart Farming	Fasilitasi asuransi ternak; Pelayanan penanganan kesehatan hewan; Peningkatan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis.	
46	Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.	Fasilitasi pengembangan Rumpun Sapi Galekan, Ayam Kampung Unggul Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (KUB), Sapi Belgian Blue (Sapi Gatotkaca) dan Wagyu. Dengan menggunakan bibit sapi unggul maka diharapkan produktivitas ternak meningkat sehingga hasil produk ternaknya bisa ditingkatkan	
47	Peningkatan jumlah destinasi wisata berbasis keunikan alam, sosial dan budaya (Desa wisata)	Optimalisasi CBT (Community Based Tourism) and Ecotourism	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
48	Penguatan kelembagaan pengelola wisata	Pengembangan kelembagaan	
49	Penguatan kebijakan pendukung dan promosi wisata	Optimalisasi branding, advertising and selling	
50	Penguatan kemitraan pengelolaan wisata	Pengembangan ekosistem pariwisata	
51	Penguatan usaha dan pelaku ekonomi kreatif	Pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif	
52	Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif	Memberikan insentif kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
53	Peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal	Mengoptimalkan investor gathering, hospitality, pameran dan menyebarluaskan informasi penanaman modal baik cetak maupun elektronik	Satu Pintu
54	Penguatan kolaborasi investasi masyarakat	Mengoptimalkan kegiatan lelang investasi	
55	Meningkatkan pengendalian penanaman modal	Meningkatkan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
56	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terintegrasi, jemput bola perizinan dan pelayanan perizinan dan layanan perizinan di <i>café</i> pelayanan publik	

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Lingkup Bidang Ekonomi, 2022

Selain berfokus pada pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga berfokus pada Transformasi Ekonomi untuk mengoptimalkan kapasitas perekonomian melalui program keperantaraan pasar berbasis smart farming. Keperantaraan Pasar adalah suatu pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi yang melibatkan aktor pasar bersama pemerintah daerah untuk mengkaji suatu masalah dari kelompok usaha-dalam hal ini, kebutuhan pasar akan komoditas tertentu-dan menciptakan solusi inovatif bersama untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Smart Farming dimaknai sebagai pendekatan inovatif untuk dapat pertanian yang mengintegrasikan teknologi ke dalam praktek pertanian, memungkinkan petani untuk mengoptimalkan hasil panen, mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknologi, termasuk sensor, drone, kecerdasan buatan dan internet of things (IoT), untuk mengumpulkan data dan memberikan wawasan waktu nyata tentang kesehatan tanaman, kualitas tanah dan indikator kunci lainnya.

Kelayakan Tempat
Tinggal/Lingkungan

Akses Kesehatan

Pengetahuan/
Ketarampitan

Ronaumsi

Pendapatan + Pendapatan

Pendapatan + Pendapatan

Pendapatan + Pendapatan

Fendapatan

Pendapatan + Pendapatan

Modal

Pendapatan

Gambar III. 1 Skema Keperantaraan Pasar Berbasis Smart Farming

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2022

Adapun Program yang dicanangkan pada Kabupaten Trenggalek merupakan kelanjutan dari pendampingan yang dilakukan oleh AUSAID melalui Kompak, yang mana program tersebut telah dilakukan proses review oleh Bappenas dan diusulkan menjadi proyek percontohan pada tingkat nasional. Sebelumnya pendampingan telah dilaksanakan di Kecamatan Pule melalui Bumdesma Sari Bumi dengan kawasan Pak Pujo (Pakel, Pule dan Jombok). Adapun skema keperantaraan pasar berbasis *smart farming* dapat dilihat pada gambar III.1

Setelah dinilai sukses diterapkan di Kecamatan Pule, selanjutnya program keperantaraan pasar akan diperluas pada Kecamatan Watulimo dengan komoditas Ikan Patin dan Desa Sukowetan Kecamatan dengan offtaker PT. Tri Sukses Mitra Mandiri. Kemudian pada Kecamatan Suruh dengan komoditas Susu Kambing Peranakan Etawa (PE). Target utama dari program keperantaraan pasar adalah penduduk usia produktif yang masuk pada DTKS atau Gertak Online

yang dikombinasikan dengan laporan dari Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk selanjutnya dilakukan perangkingan. Adapun fokus akan diarahkan pada komoditas yang telah memiliki potensi dan pasar yang jelas diantaranya adalah biofarmaka di Kecamatan Pule, ikan patin di Kecamatan Watulimo dan Karangan, susu kambing Etawa di Kecamatan Suruh, serta komoditas lainnya seperti kopi dan kakao. Tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan intervensi yang dilaksanakan lintas organisasi perangkat daerah dari hulu hingga ke hilir. Adapun program keperantaraan pasar tersebut dilaksanakan melalui:

- 1. Pelatihan dan Penyediaan Sarana Prasarana, yang diwujudkan dengan program :
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Peternakan)
 - Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Pertanian dan Pangan)
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya (Dinas Perikanan)
- 2. Pemberdayaan Kelembagaan, yang diwujudkan dengan program :
 - Program Pendidikan & Latihan Perkoperasian (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan)
 - Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat & Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- 3. Pengolahan, Pengemasan, Standar Produk dan Pemasaran, yang diwujudkan dengan program :
 - Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan)
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)
 - Program Pengembangan Ekspor (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan)
 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dinas Perikanan)

Pengolahan & Perdagangan & Pasar dan Produksi Bahan Baku Pengemasan Distribusi Konsumen Akhir 8 靐 ß ||||| ### Petani Pedagang Penyedia Pengepul UMK Industi Pasar dan (local, regional, ekspor) Input Pengolahan Pengolahan Konsumen Akhir Budidaya Membeli dan Mengolah Meniual Mengolah Penyimpanan benih/bibit memilah menjadi bahan menjadi dan distribusi dan pupuk untuk bahan setengah jadi dijual kembali jadi Jejaring & Norma Kebijakan/ Peraturan/ Program Standarisasi Produk Infrastruktur Pusat dan Daerah Sosial/Informal **Dan Kualitas**

Gambar III. 2 Skema Keperantaraan Pasar

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2022

Dimana pengembangan program smart farming berbasis keperantaraan pasar akan menjangkau proses produksi dari hulu hingga ke hilir. Kebijakan bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah difokuskan pada produkproduk yang telah memiliki pasar atau kemitraan yang jelas

dengan penampung. Salah satu pilot project yang dinilai berhasil adalah adanya kemitraan antara petani biofarmaka di Kecamatan Pule dengan PT. Bintang Todjoe. Selanjutnya pola kemitraan tidak hanya berfokus pada penjualan produk, melainkan juga pendampingan pada proses budidaya sehingga dapat diperoleh hasil produksi yang sesuai dengan standar pasar. Pola kemitraan tidak hanya berfokus pada perusahaan besar, namun juga akan dilaksanakan berkolaborasi dengan Usaha Mikro dan Kecil serta pelaku Industri Pengolahan yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Adanya pola kemitraan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas dapat produk dari petani/pembudidaya dan tercipta standarisasi produk sesuai dengan permintaan dari pasar.

Pemulihan ekonomi Kabupaten Trenggalek mendapatkan tantangan yang serius seiring dengan adanya wabah penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menjangkit pada hewan sapi dan kambing yang tengah melanda berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kasus pertama PMK di Kabupaten Trenggalek ditemukan pada tanggal 30 Mei 2022 di Dusun Sugihan Desa Sumberingin Kecamatan Karangan pada ternak sapi potong. Dari update data pada tanggal 30 Juni 2022 jumlah PMK ditemukan sebanyak 386 kasus dari total ternak sebanyak 1.583 ekor. Dari 386 kasus tersebut sebanyak 90 ekor ternak dilakukan pemotongan secara paksa dan 31 ekor ternak masih dalam masa penanganan. Mayoritas kasus PMK ditemukan pada jenis ternak sapi potong sebanyak 188 kasus, kemudian sapi perah sebanyak 132 kasus, 62 kasus belum teridentifikasi serta pada ternak kambing sebanyak 4 kasus. Adapun

rincian ternak terdampak penyakit PMK pada tingkat Kecamatan Per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 12 Rincian Ternak Terdampak PMK

		TT134T ATT	JUMLAH	KET	ERANGAN KONDIS	SI
KECAMATAN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERNAK KESELURUHAN	TERNAK TERTULAR	SEMBUH	MATI/ POTONG PAKSA	JUAL
Pule	35	113	94	19	3	
Karangan	49	134	104	15	2	
Pogalan	6	62	58	13	10	
Tugu	27	99	53	13	2	1
Dongko	4	15	6	4	-	-
Suruh	16	37	32	1	1	
Panggul	18	74	55	6	2	
Munjungan	14	40	30	11	2	
Gandusari	3	18	7	5	-	
Trenggalek	6	23	11	-	-	
Durenan	2	8	8	3	1	
Bendungan	206	960	902	-	8	
JUMLAH	386	1.583	1.360	90	31	1

Sumber: Dinas Peternakan, 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Bendungan memiliki jumlah kasus tertinggi dengan total sebanyak 206 kasus. Kecamatan Bendungan merupakan salah satu sentra utama penghasil komoditas ternak Sapi dan Kambing. Untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease) di Kabupaten Trenggalek sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan terhadap penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease), maka ditetapkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/367/406.001.3/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (Foot And Mouth Disease) pada tanggal 14 Juni 2022, berlaku pada seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Status keadaan darurat bencana tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

tidak ditemukan lagi penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease) atau tidak menjadi masalah ternak pada wilayah Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri 01/SE/PK.300/M/5/2022 Pertanian Nomor tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2022 tentang Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Penanganan Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, maka ditetapkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/365/406.001.3/2022 tentang Gugus Tugas (Task Force) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Trenggalek. Tugas utama Gugus Tugas ini adalah melaksanakan kegiatan penanganan penyakit mulut dan Kuku dalam memitigasi resiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya. Gugus tugas terdiri dari Pengarah, Penasehat, Penanggungjawab dan Pelaksana, dimana pelaksana dibagi dalam 5 (lima) bidang yaitu a) bidang kesehatan serta pengobatan hewan, lingkungan, promotif dan preventif; b) bidang percepatan pelaksanaan deteksi dini (tracing); c) bidang ekonomi; d) bidang sosial, budaya dan kehumasan; dan e) bidang pengawasan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan wabah PMK adalah sebagai berikut :

 Sosialisasi terkait perawatan hewan ternak kepada peternak melalui tenaga medis dan paramedis pada Dinas Peternakan

- Sosialisasi terkait pemotongan hewan pada pelaku usaha
 Jagal Sapi oleh Dinas Peternakan
- 3) Pengawasan secara ketat yang dilakukan oleh Dokter Hewan pada hewan ternak yang masuk dari luar daerah
- 4) Sterilisasi kendaraan pengangkut hewan ternak oleh Dinas Peternakan
- 5) Sterilisasi pasar secara menyeluruh dan dilaksanakan secara berkala
- 6) Apabila terdapat kondisi yang di luar kendali maka dapat dilakukan penutupan Pasar.

3.5. Program Pendukung Prioritas Nasional

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional tahun 2023, maka kebijakan teknis/operasional yang dilakukan Kabupaten Trenggalek antara lain sebagai berikut:

3.5.1. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada November 2019. Serta, resmi diundangkan di Jakarta pada 25 November 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. Terkait pendanaan, dalam Perpres telah tertuang bahwa percepatan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut bersumber dari 4 (empat) sumber pendanaan yaitu : APBN, APBD, kerja sama pemerintah

dan badan usaha serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Upaya percepatan pembangunan ekonomi ini, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perpres ini pedoman bagi Menteri, Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura Kepulauan di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masingmasing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Perpres ini juga menjadi pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Dalam rangka persiapan Implementasi Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan beberapa upaya diantaranya Sosialisasi Lintas Sektor serta Penyiapan *Readieness Criteria* sebagai dokumen pendukung. Daftar Program/Kegiatan dan Peta Rencana Program/Kegiatan yang masuk dalam Lampiran Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana berikut:

1. Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis

Jalan Ring 2 Selingkar wilis merupakan Jalan Nasional dengan Panjang kurang lebih 38,83 Km yang melewati Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Durenan. Jalan Ring 2 Selingkar Wilis menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung, Kondisi Jalan Ring 2 Selingkar Wilis tergolong cukup baik namun tetap membutuhkan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi untuk jalan maupun jembatan.

2. Pembangunan Pansela di Kabupaten Trenggalek

Pembangunan Jalan Pansela di Trenggalek meliputi 3 Kecamatan dan 16 Desa dengan Panjang 78,35 Km yang terdiri dari 5 ruas jalan. Berbeda dengan Jalur Pantura, kawasan selatan Jawa Timur masih belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga perkembangan perekonomiannya cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan jalur Pantura. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Pansela meningkatkan diharapkan mampu perekonomian masyarakat di sekitarnya seperti halnya yang terjadi pada Jalur Pantura. Tujuan utama pembangunan JLS adalah untuk memperlancar distribusi logistik sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi wilayah serta mampu meningkatkan investasi di kawasan selatan Jawa Timur.

3. Pelebaran dan Perbaikan Geometri Jalan Selingkar Wilis (Ring 1)

Jalan Ring 1 saat ini merupakan Jalan menghubungkan Kabupaten Kabupaten yang dengan Kabupaten Trenggalek Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Panjang Jalan Ring 1 Selingkar Wilis adalah 15,29 Km yang melewati Desa Dompyong, Masaran, Surenlor dan Depok di Kecamatan Bendungan. Kondisi jalan Ring 1 saat ini masih belum cukup baik sehingga banyak memerlukan perbaikan geometri jalan, pelebaran badan jalan serta pembangunan beberapa jembatan.

4. Pelebaran Jalan Radial Menuju Selingkar Wilis

Jalan Ring 1 Selingkar Wilis dan Jalan Ring 2 Selingkar Wilis dihubungkan oleh Jalan Radial yang berada di Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Bendungan. Ada 4 Jalan Radial dengan Panjang 50,5 Km dan sebagian memiliki kondisi yang kurang memadai sehingga membutuhkan perbaikan dan pelebaran badan jalan. Selain itu, perbaikan geometri dan penambahan sarana dan prasarana pelengkap jalan juga sangat diperlukan di beberapa ruas jalan.

5. Pelebaran Menuju Standar Jalan Nasional Durenan Prigi

Jalan Nasional Durenan – Prigi yang merupakan jalur utama menuju Pusat Kota Trenggalek. Jalan Nasional Durenan – Prigi memiliki Panjang 30,4 Km dan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Trenggalek sepanjang 16,4 Km. Kondisi Jalan Nasional Durenan –

Prigi saat ini sudah cukup baik namun tetap memerlukan perbaikan dan pelebaran jalan. Selain itu juga diperlukan Kajian perbaikan Geometri Jalan di Jalan Nasional – Prigi utamanya pada beberapa tikungan tajam dan kelandaian jalan.

6. Pengembangan Pelabuhan Prigi

Pembangunan Pelabuhan Prigi dengan luas 6,8 yang berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo merupakan bagian dari Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia melalui short-shipping Wilayah Selatan Cilacap-Pangandaran-Pelabuhan meliputi Ratu-Kulon Progo-Pacitan-Trenggalek- Banyuwangi-Benoa dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi laut yang dapat menunjang berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat. Utamanya pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas pelayaran kegiatan keselamatan dan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Tujuan utama pembangunan Pelabuhan Prigi adalah menekan cost transport sebagai solusi untuk menekan biava logistik mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi kepadatan lalu lintas serta mengurangi tingkat kerusakan jalan.

7. Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Science Techno Park Atsiri

Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan *Science Tecno Park* (STP)

Atsiri pada Kawasan Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek dirancang dengan menggunakan konsep edu-ekowisata. Konsep ini memadukan konsep pendekatan konservasi alam dan lingkungan, fungsi edukatif, sosial-budaya, dan ekonomi. Konsep perencanaan ini diharapkan dapat mempertahankan keaslian alam dan kualitas lingkungan, mempertahankan budaya, meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, kawasan dan pemerintah. Untuk Mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya pengelolaan wisata yang dapat mendukung kelestarian lingkungan melalui penerapan pola edu-ekowisata sebagai media pendidikan karakter berbasis lingkungan hidup. Eduekowisata pada prinsipnya bukan hanya menjual destinasi alam, tetapi juga "menjual" ilmu pengetahuan filsafat filsafat dan lokal. atau ekosistem dan sosiosistem.

Fokus perencanaan fisik kawasan terbagi dalam 3 zona, yaitu (1) Zona riset, pengembangan teknologi informasi, pelatihan dan inkubasi, (2) Zona agrowisata dan rekreatif, (3) Zona industri dan perdagangan. Pembangunan diprioritaskan untuk pengembangan budidaya atsiri, kopi, peternakan sapi perah, agrowisata tanaman buah dan herbal beserta fasilitas penunjang lain, seperti kantor pengelola, training & meeting centre, laboratorium, edutainment dan galeri inovasi produk, cottage, rest area, camping & outbound area, jeep challenge area, restoran, musholla, dan area parkir.

8. Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis dan Pengembangan minapolitan Panggul-Ngadipuro-Prigi:

Sentral Industri Pemindangan Ikan Bengkorok merupakan salah satu tempat pengolahan perikanan tangkap yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomian masyarakat nelayan di pantai prigi. Usaha pengolahan ikan pindang di daerah Watulimo Kabupaten Trenggalek khususnya, memiliki beberapa keuntungan misalnya, ketersediaan bahan baku ikan pindang diperoleh dari pelabuhan ikan (PPN) pada musim ikan, sehingga jarak antara tempat bahan baku dan tempat produksi cukup dekat serta mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan baik untuk pasar tradisional maupun pasar modern.

Sentra Industri Pemindangan Ikan Bengkorok (SIPIB) dikembangkan secara Optimal menjadi Kawasan Sentra Pengolahan Ikan Bengkorok (KSPIB) dengan layanan utama berupa sentra pemindangan ikan, sentra pengolahan ikan kering, sentra pengalengan ikan & petis yang berstandar higienis dan ramah lingkungan.

Pengembangan sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek berupa perikanan tangkap (laut) dan budidaya (darat/ air tawar).Beberapa indikasi Program Rehabilitasi TPI, Tambat Labuh (Jetty) dan Sentra Kuliner Perikanan – Kabupaten Trenggalek adalah:

- Peningkatan Aksesibilitas Kawasan :
- Perbaikan Akses jalan minapolitan
- Pengembangan Sarpras Minapolitan :

- Tambat Labuh
- Revitalisasi TPI Higienis
- Sentra Kuliner Perikanan
- IPAL
- Percontohan Tambak Udang
- Program Pelestarian Ekologi:
- Mangrove, Terumbu Karang, Ekosistem Pesisir dll
- Pengembangan Bidang Sosial-ekonomi Penunjang Aktivitas Kawasan Minapolitan (Rp. 1,2 M)
- Pasar Lokal Minapolitan Panggul
- Industri Pengolahan Ikan Panggul
- Sarana Penunjang Lainnya

9. Program Agropolitan Selingkar Wilis

Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) wilayah sekitarnya. agribisnis di Sistem adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on farm) tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agribisnis hilir (processing dan hasil pertanian) dan pemasaran jasa-jasa pendukungnya. Berikut beberapa Program Perpres 80/2019 terkait agropolitan:

– Pengembangan Agropolitan Watulimo – Kabupaten Trenggalek

- Pengembangan Agrowisata Bendungan :
 Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi dan Sapi
 Perah (Rumah Susu) Trenggalek
- Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan
 Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi
- Agropark sebagai Rest Area di Pansela –Kabupaten
 Trenggalek

10. Program Dewi Cemara

Dewi Cemara merupakan program Provinsi Jawa Timur dengan singkatan Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri Sejahtera. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Di Kabupaten Trenggalek mulai dikembangkan Desa Wisata yaitu di Desa Sawahan, Desa Watuagung Kecamatan Watulimo dan Desa Dompyong Kecamatan Bendungan. Desa Wisata menawarkan keindahan alam, budaya tradisi dan masyarakat setempat serta kekhasan sumberdaya alam dan produk unggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kelembagaan yang berperan utamanya adalah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang berada di bawah naungan ASIDEWI (Asosiasi Desa Wisata). Dalam Pengembangannya, Kabupaten Trenggalek juga membuat program 100 Desa Wisata.

11. Pembangunan SMK Panggul

SMKN 1 Panggul terletak di Jl. Raya Panggul – Dongko RT 04/02 Desa Nglebeng, dengan luas 14.000 m². Dasar pendirian dan operasional sekolah ini adalah 188.4/5312/101.3/2017 (SK Pendirian Sekolah) dan 421.5/5313/101.3/2017 (SK Izin Operasional). Kompetensi keahlian yang diberikan adalah Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dan Usaha Perjalanan Wisata.

3.5.2. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum kemiskinan merupakan kondisi dimana individu atau rumah tangga mengalami kekurangan pendapatan, kepemilikan, konsumsi, keterampilan dan rasa aman, ketidaklayakan tempat tinggal dan lingkungan serta ketidakmampuan dalam mengakses layanan publik terutama pendidikan dan kesehatan, akses permodalan, akses lapangan kerja serta akses teknologi dan informasi. Indikator yang dipakai dalam mengukur kemiskinan adalah garis kemiskinan, yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Berdasarkan data dari BPS, Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita sebesar 3,44 persen, upah rata-rata per jam pekerja sebesar Rp14.789,00 (mengikuti rata-rata pada tingkat provinsi), tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,53 persen serta angka garis kemiskinan pada Tahun 2021 sebesar Rp358.831,00. Dengan standar tersebut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek sebanyak 84.890 jiwa atau sebesar 12,14 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 11,62 persen. Indikator yang menjadi tujuan pemerintah yakni angka kemiskinan ekstrim yang didasarkan pada PPP

(Purchasing Power Parity) 2011 yaitu sebesar 1,90 dollar AS. Berdasarkan standar tersebut angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek sebesar 3,41 persen. Dari segi gender, capaian Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan baik yang dapat dilihat dari nilai IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) dengan capaian sebesar 93,25 poin. Ketika angka IPG makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Adapun jumlah tenaga kerja yang tercover jaminan sosial bidang ketenagakerjaan per bulan Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 13 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terkover Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pemberi Kerja/Badan Usaha Aktif	2.025
2	Tenaga Kerja Penerima Upah Aktif	13.440
3	Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Aktif	3.504
4	Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Aktif	26.848

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat memerlukan kompleks sehingga pendekatan baru berupa system thinking untuk dapat melihat permasalahan secara komprehensif mengenai unsurpenyebab kemiskinan dan kemudian dapat dipetakan keterkaitan antar faktor tersebut. Kemiskinan identik dengan kurangnya pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga untuk hidup layak yang menyebabkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan layak juga berkurang. Rendahnya level pendidikan menyebabkan keterbatasan dalam aspek pengetahuan, keterampilan serta penguasaan Teknologi dan Informasi. Selanjutnya dengan adanya keterbatasan tersebut menyebabkan tingkat daya saing yang dimiliki menjadi tidak kompetitif sehingga turut menurunkan

kesempatan kerja. Selain itu rendahnya pengetahuan dan keterampilan juga dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas yang pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima. Adapun capaian indikator pendidikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 14 Capaian Indikator Pendidikan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Formula Indikator	Capaian	Keterangan
1	Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat ke SMA/MA/SMK sederajat	%	((Jumlah siswa SMP/MTs/ Sederajat yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK) / (Jumlah lulusan siswa SMP/MTs)) X 100	Tahun 2022	Jumlah Siswa baru SMA/SMK/PKBM = 9.960Siswa Lulusan SMP/MTs = 9.681
2	APK PAUD	%	(Jumlah siswa PAUD / Jumlah penduduk usia 3 sampai 6 tahun) X 100%	80,78	Jumlah Siswa TK+TKLB+RA = 15.706 Siswa TK, TPA, SPS = 6.735 Jumlah Total 22.441 dengan jumlah penduduk usia 3-6 thn 35.103 (Sumber data Dukcapil, untuk usia 3 tahun diambil 25% dari rentan 0-3 thn)
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	(Jumlah siswa usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A) / (Jumlah penduduk usia 7- 12 tahun)	91,39	Sumber: https://apkapm.data.kemdi kbud.go.id/index.php/cbera nda/apkapmsekolahmadra sah?kode_wilayah=051700 DATA RINCIAN: Jumlah Siswa Usia 7-12 thn 56.154 ; Jumlah Penduduk Usia 7-12 th BPS = 56.555
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Pak et B	%	(Jumlah siswa usia 13-15 tahun SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia13-15 tahun)	88,94	Sumber: https://apkapm.data.kemdi kbud.go.id/index.php/cbera nda/apkapmsekolahmadra sah?kode_wilayah=051700 DATA RINCIAN: Jumlah Siswa Usia 13-15 thn 23.596; Jumlah Penduduk Usia 13-15 th BPS = 28.557
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	(Jumlah semua siswa sekolah SD/MI/Paket A) / (Jumlah penduduk usia 7- 12 tahun)	94,65	Sumber: https://apkapm.data.kemdi kbud.go.id/index.php/cbera nda/apkapmsekolahmadra sah?kode_wilayah=051700 DATA RINCIAN: Jumlah Siswa SD/Sederajat 59.546 ; Jumlah Penduduk Usia 7-12 th BPS = 56.555
6	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	(Jumlah semua siswa SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia13-	98,26	Sumber : https://apkapm.data.kemdi kbud.go.id/index.php/cbera

No.	Indikator	Satuan	Formula Indikator	Capaian Tahun 2022	Keterangan
	SMP/MTS/Pak et B		15 tahun)		nda/apkapmsekolahmadra sah?kode_wilayah=051700 DATA RINCIAN: Jumlah Siswa SMP/Sederajat 28.715; Jumlah Penduduk Usia 13-15 th BPS = 28.557
7	Angka Putus Sekolah SD/ Sederajat	%	((Jumlah siswa putus sekolah SD/ Sederajat)/ Jumlah semua siswa sekolah SD/Sederajat	0,30	Sumber : Data Profil Pendidikan dan Data Kemenenag (Jumlah siswa=58.009 Jumlah Siswa Putus=9) Kondisi Desember 2021
8	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat (AP)	%	(Jumlah siswa putus sekolah SMP/ Sederajat)/ Jumlah semua siswa sekolah SMP/ Sederajat)		Sumber : Data Profil Pendidikan dan Data Kemenenag (Jumlah siswa 58.009; jumlah siswa putus 9 (Kondisi Desember 2021)
9	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat (AP)	%	(Jumlah siswa putus sekolah SMP/ Sederajat)/ Jumlah semua siswa sekolah SMP/ Sederajat)	1,60	Sumber : Data Profil Pendidikan dan Data Kemenenag (Jumlah siswa=28.450 Jumlah Siswa Putus=45) Kondisi Desember 2021
10	Angka Kelulusan SD/ Sederajat (AL)	%	(Siswa Lulus Sd/ Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Sd Tahun Sebelumnya X 100)	100	Sumber : Data Profil Pendidikan dan Data Kemenenag (7.760/5.942*100)
11	Angka Kelulusan SMP/ Sederajat (AL)	%	(Siswa Lulus Smp/Mts/ Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Smp/Mts Tahun Sebelumnya X 100)	100	Sumber : Data Profil Pendidikan dan Data Kemenenag (=7.677/6.330*100)
12	Angka Rasio Guru dibanding Siswa SD	Perban dingan		1:12	Sumber : Data Profil Pendidikan Siswa SD 42.947 Jumlah Pendidik 3.499
13	Angka Rasio Guru dibanding Siswa SMP	Perban dingan		1:15	Sumber : Data Profil Pendidikan Siswa SMP 22.445; Jumlah Pendidik 1.551
14	Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun)	Perban dingan			Jumlah Pendiudik Usia 7-12 (56.555) Jumlah Sekolah (SD/ Sederajat = 558)
15	Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah (13-15 Tahun)	Perban dingan			Jumlah Penduduk Usia 13- 15 (28.557) jumlah Sekolah = 109)

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

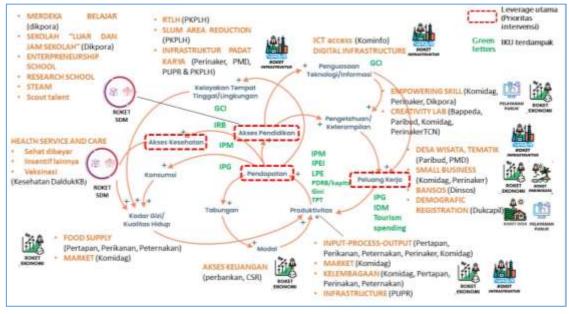
Rendahnya pendapatan selanjutnya dapat berpengaruh pada tingkat kelayakan tempat tinggal atau lingkungan. Ketidaklayakan pada lingkungan tempat tinggal dapat memicu penyakit sehingga dapat

menimbulkan permasalahan yang terkait kesehatan. Kemudian rendahnya tingkat pendapatan juga dapat menurunkan kemampuan untuk mengakses bahan makanan yang bergizi. Sehingga produktivitas dan daya saing yang dimiliki cenderung lebih rendah daripada individu yang dapat mengakses bahan makanan yang bergizi. Adapun capaian indikator kesehatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 15 Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
а	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	30	43,6	65,76	117,11	90,27	77,82
ъ	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	60	68,67	92,65	225,9	90,75	104,22
c	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	60	115,67	80,19	92,26	124,96	100,64
đ	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	100	100	100	100	31,99	89,41
е	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV- AIDS (%)	63	89,35	100	94,58	102,2	86,25
f	Persentase RFT Rate penderita kusta (%)	90	83,33	100	100	100	100
g	Persentase desa ODF (%)	73	85,35	100	100	100	100

 $Sumber: Dinas\ Kesehatan\ Pengendalian\ Penduduk\ dan\ KB$



Gambar III. 3 Model Pengentasan Kemiskinan

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2022

Adapun intervensi dalam penanganan kemiskinan, seharusnya dapat dilakukan secara simultan sehingga dapat tertangani secara komprehensif. Namun adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama oleh Pemerintah Daerah harus mampu diatasi dengan pengalokasian yang tepat. Faktor pengungkit yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah akses pendapatan, akses kesehatan, akses pendidikan dan peluang kerja. Keempat faktor tersebut dapat dilakukan intervensi dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Hal tersebut sesuai dengan research peraih nobel ekonomi pada tahun 2019 yakni Banerjee dan Dufflo yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan

di Indonesia maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sarana SD
- 2) Bantuan siswa kekurangan
- 3) Fokus pada kemampuan baca hitung
- 4) Pembaruan kontrak guru berdasarkan nilai siswa yang diajar
- 5) Pengobatan sakit cacing pada anak
- 6) Perluasan jangkauan kepesertaan BPJS

Menindaklanjuti hal tersebut berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek diantara adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Pendapatan
 - Peningkatan akses keuangan masyarakat melalui kerjasama dengan lembaga keuangan seperti Perbankan dan Koperasi.
 - 2) Peningkatan kualitas akses infrastruktur pada kawasan wisata potensial.
 - 3) Pemberian bantuan faktor-faktor produksi pada UMKM dari hulu hingga ke hilir
 - 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pada kelompokkelompok kewirausahaan masyarakat
- Akses Kesehatan
 - 1) Pemberian vaksinasi covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat
 - 2) Pemberian insentif berupa sehat dibayar bagi masyarakat yang rutin melakukan cek kesehatan

- Rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat tidak mampu dan penataan kawasan kumuh
- 4) Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program penerima bantuan iuran daerah (PBID)
- 5) Penyediaan perlindungan berupa jaminan persalinan bagi masyarakat miskin

• Akses Pendidikan

- Pemberian bantuan pendidikan Bidikmisi pada mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri yang masuk pada database DTKS
- Pemberian bantuan pendidikan dan peralatan pada siswa miskin SD dan SMP yang masuk pada database DKTS
- 3) Pelaksanaan program kesetaraan Kejar Paket A, B dan C pada masyarakat putus sekolah
- Peningkatan Peluang Kerja
 - Peningkatan peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui Klinik BUMDes/BUMDesma
 - 2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)
 - 3) Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

3.5.3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penghapusan kemiskinan ekstrim merupakan agenda prioritas pemerintah. Sebagaimana arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan

pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kementerian diprakarsai oleh Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Agar program lebih terarah dan target dapat dicapai, definisi kemiskinan ekstrem perlu disepakati. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antar waktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di bawah USD1,9 per hari. Artinya, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari

atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Gambar III. 4 Definisi Miskin Ekstrem

Penduduk miskin ekstrem merupakan penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup seharihari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) yang didefinisikan sebagai unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.



Sumber: Kemenko PMK, 2022; Diolah

Kemudian melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, menetapkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi dan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi sebagai kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024. Kabupaten Trenggalek sendiri masuk dalam perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Kabupaten Trenggalek sebesar 3,41% yang kemudian turun signifikan menjadi 0,96% di tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 6,73 ribu jiwa. Namun pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem naik menjadi 1,52% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,63 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat penambahan penduduk miskin ekstrem sebesar 3,9 ribu jiwa.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 dicapai melalui keterpaduan dan sinergi program, serta sama antar kementerian /lembaga maupun pemerintah daerah. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Kemiskinan Penghapusan Ekstrem, Presiden menginstruksikan semua pihak untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Gambar III. 5 Hasil Penghitungan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten
Trenggalek 2021 -2022



Sumber: BPS, 2022; Diolah

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 dicapai melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kementerian kerja sama antar /lembaga maupun pemerintah daerah. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Kemiskinan Penghapusan Ekstrem, Presiden menginstruksikan semua pihak untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan integrasi ketepatan sasaran dan program kementerian/lembaga dengan melibatkan peran difokuskan masyarakat yang pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Gambar III. 6 Tugas, Fungsi dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



Sumber: Kemenko PMK, 2022; Diolah

Terkhusus untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, Presiden menginstruksikan para Bupati/Wali Kota untuk:

- 1. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- 2. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
- 3. Menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota serta mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address;

- 4. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek mewujudkan PPKE tahun 2024 dilakukan berdasar pada tiga pilar kebijakan, yaitu:

- 1. Pilar I: Komitmen Pemerintah
 - a. Program dan kegiatan dalam mendukung PPKE tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. Penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2. Pilar II: Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran
 - a. Pengalokasian APBD terhadap pelayanan dasar dan
 - b. Pemberdayaan untuk mendukung program nasional;
 - c. Dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan;
 - d. Inovasi program komplementer/inisiatif daerah;
 - e. Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait; dan
 - f. Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor non pemerintah.
- 3. Pilar III : Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - b. Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala.

c. Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk memastikan tercapainya target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, diperlukan kebijakan pendukung terkait:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
- 2. Penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat dan berdasarkan status/tingkat kesejahteraan
- 3. Pelaksanaan keterpaduan dan sinergi program lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain
- 4. Peningkatan keterpaduan dan sinergi program berbasis pada kebutuhan penduduk
- 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Pusat dan Daerah serta layanan terstandarisasi
- 6. Perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang inklusif

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui sosial, program bantuan jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Program Bantuan Biaya Personal dan Perlengkapan Siswa Miskin SD dan SMP
- b. Program BOP Non Formal Dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional sekolah
- c. Pemberian PMT Balita Gizi Kurang dan Bumil KEK
- d. Penerima Bantuan Iuran (PBID)
- e. Program Keluarga Sehat Yang Beruntung
- f. Program Sembako
- g. Program Keluarga Harapan (PKH)
- h. Program Rehabilitasi Sosial
- Fasilitasi Angkutan Pelajar, Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya
- j. Program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Bankumkin)
- k. Program Bidikmisi
- 1. Program Beasiswa STEAM.
- 2. Peningkatan pendapatan masyarakat Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
 - a. Pelatihan Berbasis Kompetensi
 - b. Program Female Preneuer
 - c. Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Industri, Bidang Perkebunan dan Bidang Pertanian
 - d. Pemberangkatan dan Pengerahan Transmigrasi
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
 - f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- h. Pelatihan Pokdarwis
- i. Paket Keperantaraan Pasar
- j. Paket Kolam Lele Keluarga
- k. Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
- Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian
- m. Program Penyuluhan Pertanian
- 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 Penduduk Miskin
 - c. Layanan Administrasi Kependudukan
 - d. Program Gerakan Pembudayaan Minat Baca
 - e. Program Perpustakaan Desa
 - f. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - g. Program PAMSIMAS
 - h. Program Penanggulangan Jaringan Air Bersih/Air Minum perdesaan
 - i. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi:

Pendapatan Asli Daerah, melalui :

- a) Intensifikasi ekstensifikasi sumber-sumber dan memperhatikan aspek legalitas, pendapatan yang kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsipprinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru;
- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;

- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
- g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

Pendapatan Transfer melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber objek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:
 - realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
 - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan didasarkan

pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahuntahun sebelumnya;

d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, melalui :

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;

<u>Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023</u>

Dibandingkan dengan APBD TA 2023, pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2023 diperkirakan akan meningkat sebesar 1,90% atau meningkat sebesar Rp34,328 miliar. Perubahan pagu pendapatan daerah tersebut terdapat pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD TA 2023 diproyeksikan meningkat sebesar 2,66%. Peningkatan PAD tersebut disumbang adanya peningkatan pada pendapatan dari Pajak Daerah yang naik sebesar 14,87% dan Retribusi Daerah yang naik sebesar 0,39% serta pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik sebesar 0,42%.

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD TA. 2023 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar 1,65%. Perubahan Pendapatan Transfer tersebut disebabkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diroyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,86% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar 12,13%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meningkat sebesar 0,86% disebabkan penerimaan alokasi Dana Perimbangan mengalami perubahan pada asumsi penerimaan Dana Perimbangan pos alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak. Transfer Sedangkan untuk Pendapatan Antar Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 12,13% disebabkan penerimaan alokasi Pendapatan Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi) mengalami peningkatan sebesar Rp9,053 miliar dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalami peningkatan sebesar Rp3,810 miliar.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 (*dalam jutaan rupiah*)

	Realisasi	Target APBD 2023				
URAIAN	2022	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%	
PENDAPATAN	2.046.436,06	1.810.056,49	1.844.385,23	34.328,74	1,90	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	422.488,72	279.797,92	287.251,93	7.454,01	2,66	
Pendapatan Pajak Daerah	48.342,17	43.711,50	50.211,50	6.500,00	14,87	
Hasil Retribusi Daerah	16.986,53	25.579,00	25.679,00	100,00	0,39	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.836,04	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	351.323,97	205.099,42	205.953,43	854,01	0,42	
PENDAPATAN TRANSFER	1.618.122,57	1.525.398,57	1.550.513,30	25.114,73	1,65	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.476.720,34	1.419.366,72	1.431.617,04	12.250,33	0,86	
Dana Perimbangan	1.300.645,39	1.236.794,77	1.249.045,09	12.250,33	0,99	
Dana Insentif Daerah	19.284,47	20.692,53	20.692,53	0	0,00	
Dana Desa	156.790,48	161.879,42	161.879,42	0	0,00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.402,23	106.031,85	118.896,26	12.864,40	12,13	
Pendapatan Bagi Hasil	124.452,09	103.301,45	112.355,39	9.053,93	8,76	
Bantuan Keuangan	16.950,14	2.730,40	6.540,87	3.810,47	139,56	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.824,77	4.860,00	6.620,00	1.760,00	36,21	
Pendapatan Hibah	5.817,73	4.860,00	6.620,00	1.760,00	36,21	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	7,04	0	0	0	0	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan KUA PPAS tahun 2023 dengan arahan sebagai berikut:

- Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Layanan/Fungsi menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;

- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023, disinkronisasi dengan arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2023.

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan KUA Tahun 2023 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar Rp170,59 miliar dibanding sebelum perubahan. Peningkatan proyeksi belanja daerah tersebut diantaranya bersumber dari SiLPA tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan kembali, tambahan penerimaan DBH CHT, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi dan perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi. Perubahan belanja daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi diproyeksikan bertambah Rp117,513 miliar atau naik 8,41%;
- Belanja Modal diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp57,778 miliar atau naik 34,64%;
- c. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan menurun sebesar 38,74% dibanding sebelum perubahan. Pos belanja tidak terduga ini juga menampung SiLPA tahun 2022, diantaranya sisa DAK, sisa BK Provinsi, sisa DPID tahun 2021 dan sisa anggaran yang penganggarannya bersifat mengikat tidak dapat dialokasikan kembali terkait kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi;
- d. Belanja Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,61% atau naik sebesar Rp4,460 miliar, hal ini dikarenakan adanya perubahan besaran proyeksi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga menyebabkan perubahan proyeksi penerimaan bagi hasil ke pemerintah desa.

Tabel V. 1 Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Target Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

Kode Uraian	Uraian	Realisasi APBD	APBD	P-APBD	Bertambah/	%
	2022	2023	2023	Berkurang		
5		2.167.412,24	1.864.009,63	2.034.601,32	170.591,69	9,15
5,1	BELANJA OPERASI	1.343.536,02	1.397.262,10	1.514.775,26	117.513,16	8,41
5.1.01	Belanja Pegawai	770.428,55	818.692,93	812.586,75	-6.106,18	-0,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.914,79	514.223,34	611.342,14	97.118,79	18,89
5.1.03	Belanja Bunga	6.001,52	14.793,13	12.793,13	-2.000,00	-13,52
5.1.04	Belanja Subsidi	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.011,12	47.016,86	75.774,30	28.757,44	61,16
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.174,95	2.535,85	2.278,95	-256,90	-10,13
5,2	BELANJA MODAL	552.521,69	166.808,60	224.586,53	57.777,93	34,64
5.2.01	Belanja Modal Tanah	139,79	4.041,35	7.519,35	3.478,00	86,06
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.067,59	66.620,51	81.520,95	14.900,44	22,37

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.244,12	56.206,01	60.894,77	4.688,76	8,34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.946,67	37.226,97	71.763,21	34.536,23	92,77
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.123,53	2.629,14	2.584,14	-45,00	-1,71
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	84,61	304,11	219,50	259,41
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.340,00	23.643,03	14.483,63	-9.159,40	-38,74
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.340,00	23.643,03	14.483,63	-9.159,40	-38,74
5,4	BELANJA TRANSFER	268.014,51	276.295,90	280.755,90	4.460,00	1,61
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.883,50	7.423,55	8.083,55	660,00	8,89
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	262.131,01	268.872,35	272.672,35	3.800,00	1,41

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan Pemerintah pengeluaran uang dari Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

1. Belanja Operasi

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai

berikut:

- 1. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan:
 - a) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/ Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K/PPPK);
 - b) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
 - d) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
 - f) tambahan penghasilan PNSD/ ASN.
- 2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk:
 - a) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 - b) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah.
- 3. Belanja Bunga atas pinjaman daerah.
- 4. Belanja Hibah yang diberikan kepada

badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada pemerintahan bertujuan lembaga non yang untuk peningkatan kesejahteraan. Belanja Bantuan Sosial juga diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

2. Belanja Modal

Kebijakan penganggaran penggunaan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

- Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk Pandemi Covid-19, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta adanya mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

4. Belanja Transfer

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir, Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani;

2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
- 4) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2023 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

5) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya serta kewajiban pembayaran atas kebijakan pinjaman daerah yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2023 meliputi penyertaan modal ke PDAM sebagai bentuk investasi pemerintah.

Pada Perubahan APBD TA. 2023, pembiayaan daerah mengalami perubahan, diantaranya pada pos SiLPA, penerimaan pinjaman daerah dan pada pos pembentukan dana cadangan untuk persiapan/dukungan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024.

Tabel VI. 1 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Target Perubahan Pembiayaan pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 (*dalam jutaan rupiah*)

	Realisasi	Target APBD 2023				
URAIAN	2022	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%	
PEMBIAYAAN NETTO	405.503,50	53.953,14	190.216,08	136.262,94	252,56	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	413.207,59	142.953,14	284.730,13	141.776,99	99,18	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	224.788,25	142.750,32	284.527,31	141.776,99	99,32	
Penerimaan Pinjaman Daerah	188.296,58	0	0	0	0	

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	122,76	202,82	202,82	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.704,09	89.000,00	94.514,05	5.514,05	6,20
Pembentukan Dana Cadangan	0	29.000,00	29.000,00	0	0
Penyertaan Modal Daerah	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	4.704,09	57.000,00	62.514,05	5.514,05	9,67

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD TA. 2023 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada proyeksi Perubahan APBD TA. 2023 diarahkan pada:

- Pembentukan dana cadangan sebesar Rp29 miliar dalam rangka dukungan penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2024;
- 2. Penyertaan modal ke PDAM tetap sebesar Rp3 miliar, sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah, diperuntukkan guna penyambungan saluran/ sambungan rumah perpipaan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 3. Pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Trenggalek ketika mengambil kebijakan pinjaman daerah ke pemerintah pusat melalui PT. SMI sebesar Rp62,514 miliar atau bertambah sebesar 9,67%.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai dasar Perubahan APBD TA. 2023 masih sesuai dengan kebijakan sebelum Perubahan RKPD Tahun 2023, diantaranya dapat dilaksanakan melalui:

a. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, mulai tahun 2020 Pemerintah kebijakan pinjaman kepada mengeluarkan daerah. Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diberikan kepada Pemerintah terdampak Daerah (Pemda) yang Covid-19 dan punya program/kegiatan yang jelas untuk menanganinya. Ada 2 jenis pinjaman yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk daerah dalam rangka PEN. Pertama, Pinjaman PEN Daerah yang sumber dananya dari APBN dan Kedua, Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang sumber dananya dari PT SMI. Dasar hukum Pinjaman PEN Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
 - Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas
 - Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengololaan Pinjaman PEN untuk Pemda, sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK Nomor 43/PM.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah;
- 4. Syarat Pinjaman PEN Daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;

Dengan adanya beberapa alternatif tersebut pinjaman daerah tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pendanaan secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

b. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut Melalui KPBU. alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek. Adapun karakteristik proyek KPBU meliputi:

- Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
- 2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
- Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
- 4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan

- 5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.
 - Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:
 - Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
 - 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - 4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
 - 5) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

c. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangun Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada Single Bottom Line (SBL) atau nilai perusahaan (corporate value) dilihat dari segi kondisi ekonominya (financial) saja. Tapi lebih berpijak pada triple bottom line (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (Profit, People dan Planet). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Trenggalek selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

e. Kolaborasi APBDesa

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan

APBDesa. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan Pemerintah Desa, sehingga antara kabupaten dan desa dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Perubahan Tahun 2023 dan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan masyarakat Kabupaten Trenggalek dapat merasakan harapan optimal manfaatnya secara dari pembangunan yang direncanakan.

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 11 Agustus 2023

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Ketua,

SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.

Wakil Ketua,

DODING RAHMADI, S.T.

Wakil Ketua,

ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.

Wakil Ketua,

AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.

KUA PERUBAHAN 2023